

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN
PETANI KAKAO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM
(Studi Di Batulappa Pinrang)**



Oleh:

ADRIANTO KASIM
NIM 13.2200.122

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN
PETANI KAKAO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM
(Studi Di Batulappa Pinrang)**



Oleh:

**ADRIANTO KASIM
NIM 13.2200.122**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan
Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN
PETANI KAKAO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM
(Studi Di Batulappa Pinrang)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi
HES (Hukum Ekonomi Syariah)**

Disusun dan diajukan oleh

**ADRIANTO KASIM
NIM 13.2200.122**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Adrianto Kasim
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Daerah Dalam Pernerdayaan Petani Kakao Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Di Batulappa Pinrang)
Nomor Induk Mahasiswa : 13.2200.122
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare No. B.15/S.ti.08/PP.00.01/1/2017
Tanggal Persetujuan : Kamis, 15 November 2018

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H
NIP : 1976111 8200501 1 002
Pembimbing Pendamping : Rusnaena, M. Ag
NIP : 19680205 200312 2 001



Mengetahui:
Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi
Islam



Budiman, S.Ag., M.HI
NIP. 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN
PETANI KAKAO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM
(STUDI DI BATULAPPA PINRANG)**

Disusun dan diajukan oleh

ADRIANTO KASIM
NIM 13.2200.122

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 15 November 2018 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H
NIP : 19761118 200501 1 002
Pembimbing Pendamping : Rusnaena, M.Ag
NIP : 19680205 200312 2 001



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan
Petani Kakao Perspektif Hukum Ekonomi Islam
(Studi Di Batulappa Pinrang)

Nama : ADRIANTO KASIM

NIM : 13.2200.122

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
No. B.15/S.ti.08/PP.00.01/1/2017

Tanggal Kelulusan : 28 Januari 2019

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H (Ketua)

Rusnaena, M.Ag (Sekretaris)

Badruzzaman, S.Ag., M.H (Anggota)

Dr. Hj. Saidah, SHi., M.H (Anggota)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui

~~Rektor, IAIN Parepare~~



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt., berkat hidayah, taufik, dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Sitti Hasna, Ayahanda Muh. Kasim, dan Tanteku Hj. Mia Alimuddin serta saudara-saudariku tercinta berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Zainal Said, MH. dan Ibu Rusnaena, M.Ag. Selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Budiman, M.HI selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Atas Pengabdianya Telah Menciptakan Suasana Pendidikan Yang Positif bagi mahasiswa.
3. Aris, S.Ag., M.HI. selaku Penanggung Jawab Program Studi Hukum Ekonomi Islam/ *Muamalah*.
4. Dr. Sitti Jamilah, M.Ag. selaku Penasehat Akademik di Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang selalu seantiasa memberikan peneliti bimbingan positif, serta motivasi yang berguna bagi penulis selama kuliah di IAIN Parepare.

5. Bapak/Ibu dosen beserta admin jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Parepare yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama kuliah di IAIN Parepare.
6. Sahabat teman dekat, senior-senior, dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dan meluangkan waktu menemani serta membantu penulis dalam mencari referensi dan menyelesaikan penelitian dan penulisan.
7. Para keluarga besar pemerintah daerah dari dinas peternakan dan perkebunan serta kelompok tani kakao di Kec. Batulappa Kab. Pinrang yang telah memberi informasi dan data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian.

Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. Berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal ariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 31 Januari 2019

Penulis



ADRIANTO KASIM

NIM. 13.2200.122

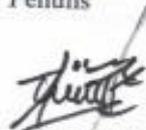
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ADRIANTO KASIM
NIM : 13.2200.122
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang/17/03/1994
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Petani Kakao
Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Di Batulappa
Pinrang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 31 Januari 2019
Penulis



ADRIANTO KASIM
NIM. 13.2200.122

ABSTRAK

Adrianto Kasim, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Petani Kakao Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Di Batulappa Pinrang)*.
(Dibimbing oleh Bapak Dr. Zainal Said, M.H. dan Ibu Rusnaena, M.Ag.)

Pemerintah daerah memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengatasi suatu permasalahan terutama hama dan penyakit tanaman kakao. Oleh karena itu, perlunya sebuah peran pemerintah daerah dalam memberdayakan petani kakao agar mampu mengatasi penyakit hama yang menyerang lahan pertaniannya dan meningkatkan hasil pertaniannya yang produktif terhadap petani.

Dalam Penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Lokasi penelitian ini di Kec. Batulappa Kab. Pinrang. Teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber yaitu teknik *Purposive Sampling*. Validasi data menggunakan teknik triangulasi dari metode alam level mikro.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah memberikan pelatihan dibidang praktik perkebunan kakao dalam meningkatkan pengetahuan petani di Batulappa Pinrang adalah diberikan SLPHT, dan metode PsPSP. Peran pemerintah daerah dalam memberikan pengetahuan kepada petani kakao tentang cara pengolahan biji kakao di Batulappa Pinrang yaitu petani diberikan sosialisasi, dan penyuluhan dalam mengelolah biji kakao. Namun cara mengeringkan kakao tidak konsisten, serta kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam mengatasi hama perkebunan kakao. Akibatnya kualitas biji kakao menurun. Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan taraf hidup petani kakao di Batulappa Pinrang berdasarkan hukum ekonomi islam sudah maksimal karena pemerintah daerah sudah memberikan bantuan berupa sarana produksi, dan peralatan. Namun peningkatan kehidupan ekonomi petani kakao masih minim karena harga biji kakao relatif rendah. Akibatnya kualitas mutu kakao secara produktif memburuk.

Key Word: Peran, Pemerintah Daerah, Pemberdayaan Petani, Hukum Ekonomi Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGAJUAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	
KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Tinjauan Teoritis.....	8
2.2.1 Ruang Lingkup Peran.....	8
2.2.2 Fungsi Peran.....	9
2.2.3 Jenis-jenis Peran.....	9
2.2.4 Teori Peran Menurut Para Ahli.....	10
2.2.5 Pemerintah Daerah.....	14
2.2.6 Pemberdayaan.....	19

2.2.7	Petani.....	22
2.2.8	Hukum Ekonomi Islam.....	25
2.3	Tinjauan Konseptual.....	28
2.4	Bagan Kerangka Pikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Jenis Penelitian.....	33
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
3.3	Fokus Penelitian.....	34
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	34
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.6	Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
4.2	Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Pelatihan Di bidang Praktik Perkebunan Kakao Dalam Meningkatkan Pengetahuan Petani Di Batulappa Pinrang.....	46
4.3	Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Pengetahuan Kepada Petani Kakao Tentang Cara Mengelolah Biji Kakao Di Batulappa Pinrang.....	57
4.4	Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Petani Di Batulappa Pinrang Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam.....	70
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan.....	80
5.2	Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....		83
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.4	Kerangka Fikir	29
Tabel 4.1.4.1.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Laki-Laki dan Perempuan Yang Masih Hidup Kec. Batulappa Kab. Pinrang	44
Tabel 4.2.1.1	Daftar Nama Anggota Kelompok Tani Kakao Kec. Batulappa Kab. Pinrang	55
Tabel 4.3.1	Jenis Peran Kelembagaan Pemerintah Kab. Pinrang Dinas Peternakan dan Perkebunan Dari Kabid Agribisnis dan Penyuluhan Perkebunan	60
Tabel 4.3.2	Jenis Peran Kelembagaan Pemerintah Kab. Pinrang Dinas Peternakan dan Perkebunan Dari kabid Pengembangan Perkebunan	63

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1	Surat Izin Penelitian Dari IAIN Parepare
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian Dari Kesbang Kab. Pinrang
3	Surat Keterangan Dari Kantor Kecamatan Batulappa Kab. Pinrang
4	Bukti Wawancara
5	Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Pinrang Dinas Peternakan dan Perkebunan Kab. Pinrang
6	Struktur Aturan Fungsional Peran Pemerintah Daerah Dinas Peternakan dan Perkebunan Kab. Pinrang
7	Dokumentasi
8	Riwayat Hidup Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemimpin merupakan orang yang paling bertanggung jawab dalam sebuah organisasi. Pemimpin yang baik, selain harus menjalankan organisasi sesuai dengan tujuan yang direncanakan, juga harus mampu menyeterahkan bawahannya. Jika organisasi itu dalam bentuk partai, maka bukan sekedar partai yang besar, tetapi para anggotanya juga harus sejahtera baik lahir dan batin. Sebagai contoh, misalnya ketika seorang pemimpin belum menjadi anggota sebuah organisasi, ia masih mengutamakan ego pribadinya, tetapi setelah itu bergabung dalam organisasi itu, ia hendaknya mampu menjadi orang yang menumbuhkan kebersamaan pada diri masing-masing anggota.¹

Secara mendasar salah satu tugas pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia karena secara tegas telah dinyatakan dalam pembukuan UUD 1945, bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pernyataan tersebut memberi arti bahwa pemerintah mempunyai peranan sentral baik secara perencana, penggerak, pengendali dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Kegagalan dan keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh kemampuan semua pihak yang terlibat dalam proses pengembangan masyarakat untuk memahami realitas masyarakat. Pentingnya

¹Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 33.

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan mekanisme pembangunan nasional yang menjadikan masyarakat pada akhirnya berperan sebagai pelaku utama kegiatan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan sampai pada tindak lanjut, untuk itulah diperlukan payung hukum bagi penyelenggara sistem pembangunan nasional yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang sesuai spirit kebangsaan Indonesia yang tidak hanya dapat menjembatangi konteks mikro kedalam konteks makro tetapi juga sebaliknya menerjemahkan konteks makro kedalam konteks mikro.

Kesejahteraan ditandai dengan adanya kemakmuran yaitu meningkatnya konsumsi yang disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dan pendapatan meningkat karena adanya peningkatan produksi yang selanjutnya membuka kesempatan kerja guna menciptakan pendapatan dan peluang menciptakan kesejahteraan masyarakat bagi seluruh rakyat Indonesia. Proses pemberdayaan masyarakat merupakan suatu program yang berkesinambungan, pemberdayaan masyarakat mengandung arti mengembangkan kondisi dan situasi sedemikian rupa sehingga masyarakat memiliki daya dan kesempatan untuk mengembangkan kehidupannya.

Dalam indikator efektifitas dan peran pemerintah daerah baik itu legislatif, yudikatif maupun eksekutif yang diukur adalah persepsi responden tentang sejauh mana kualitas pelayanan publik, kualitas birokrasi, sejauh mana kemandiriannya dari tekanan politik, kualitas perumusan, dan pelaksanaan kebijakan publik sekaligus seperti apa kredibilitas komitmen pemerintah dalam menjalankan tugasnya, yakni melayani rakyatnya dan dalam menangani berbagai masalah nasional atau sosial yang kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini pengelolah negara harus menciptakan sinerjitas yang tinggi, rasa solidaritas yang tinggi dan rasa tanggu jawab yang tinggi atas tugasnya sebagai

pelayan masyarakat. Karena dengan adanya sinerjitas yang tinggi, solidaritas yang tinggi dan rasa tanggung yang tinggi, maka kesenjangan dalam dunia pemerintahan yang selama ini mencekam dan menjadi cambuk bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia bisa kita atasi, bahkan kita hapuskan dari bumi pertiwi dan menciptalah hubungan harmonisasi yang baik antara pemerintah dengan pemerintah, antara pemerintah dengan masyarakatnya dan antara masyarakat dengan masyarakat.

Pemerintah daerah, khususnya Kab. Pinrang harus memiliki inovasi atau terobosan baru untuk mensejahterakan masyarakatnya karena kesejahteraan masyarakat adalah awal dari pradaban daerah itu sendiri. Mengingat bahwa daerah Kab. Pinrang adalah daerah yang pendapatan terbesarnya dari sektor pertanian, maka pemerintah Kab. Pinrang harus berpikir keras memberdayakan petaninya dan meningkatkan hasil panennya dalam setiap tahunnya. Pemberdayaan petani merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produktifitas hasil panen, akan tetapi pemberdayaan petani itu sendiri kerap muncul beberapa persoalan serius yang sulit diretas masyarakat setempat terutama di masyarakat Kelurahan Kassa di Kec. Batulappa Kab. Pinrang, lantaran kurangnya pemahaman petani dalam merawat tanamannya untuk menjaga kelangsungan hidupnya dan cara meningkatkan hasil panennya, sehingga bukan peningkatan produktifitas yang dirasakan masyarakat petani di Kelurahan Kassa, melainkan penurunan produktifitas.

Daerah Kab. Pinrang khususnya di Kec. Batulappa adalah daerah pegunungan yang hampir seluruh warganya bercocok tanam dengan tanaman kakao karena selain daerahnya daerah pegunungan, tanaman kakao juga lebih mudah cara perawatannya, akan tetapi seiring berjalannya waktu ditengah perkembangnya teknologi, banyak penyakit tanaman pertanian yang sulit bagi

masyarakat di Kec. Batulappa untuk mengatasinya terutama penyakit kakao sehingga sangat diperlukan peran pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat di Kec. Batulappa agar mampu mengatasi penyakit hama yang menyerang lahan pertaniannya dan meningkatkan hasil panennya.

Daerah Batulappa juga adalah daerah surga para tanaman karena kesuburannya yang mampu menumbuhkan suburkan semua jenis tanaman terutama tanaman kakao, akan tetapi walaupun daerah itu mampu menumbuhkan suburkan semua jenis tanaman termasuk tanaman kakao, tanpa ada kerja sama yang baik antara masyarakat setempat dengan pemerintah Kab. Pinrang untuk belajar mengelolah daerah itu dan mau memberdayakan petaninya maka daerah itu bukanlah daerah yang mampu menumbuhkan suburkan segala jenis tanaman, melainkan daerah yang mampu menimbun kekayaan alamnya yang membuat penimbunnya merangkak ke daerah tetangga untuk bercocok tanam. Sudah seharusnya dan sepantasnya pemerintah Kab. Pinrang punya perhatian khusus kepada daerah-daerah yang tertinggal, terutama daerah yang punya kekayaan alam yang melimpah untuk diberikan pemberdayaan kepada masyarakatnya khususnya kepada masyarakat petani untuk dikelola dengan baik agar dapat menghasilkan hasil produktifitas yang tinggi dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Kab. Pinrang khususnya di daerah Kec. Batulappa.

Berdasarkan uraian di atas dengan memperhatikan beberapa persoalan yang akan diteliti, sesuai apa yang diterapkan oleh pemerintah daerah, yakni melayani rakyatnya. Kemudian, menyusunnya dalam skripsi yang berjudul *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Petani Kakao Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Di Batulappa Pinrang)*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokoknya adalah Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Petani Kakao Perspektif Hukum Ekonomi Islam Di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. maka rumusan penelitian ini, yaitu:

- 1.2.1 Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Memberikan Pelatihan Dibidang Praktik Perkebunan Kakao Dalam Meningkatkan Pengetahuan Petani Di Batulappa Pinrang ?
- 1.2.2 Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Pengetahuan Kepada Petani Kakao Tentang Cara Pengelolaan Biji Kakao Di Batulappa Pinrang ?
- 1.2.3 Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Petani Di Batulappa Pinrang Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Islam ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk Mengetahui Peran Pemerintah Daerah Memberikan Pelatihan Dibidang Praktik Perkebunan Kakao Dalam Meningkatkan Pengetahuan Petani Di Batulappa Pinrang.
- 1.3.2 Untuk Mengetahui Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Pengetahuan Kepada Petani Kakao Tentang Cara Pengelolaan Biji Kakao Di Batulappa Pinrang.
- 1.3.3 Untuk Mengetahui Peran Pemerintah Daerah Dalam Menigkatkan Taraf Hidup Petani Di Batulappa Pinrang Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Islam.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1.4.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsi pemikiran kepada masyarakat petani kakao terhadap pemerintah daerah.

1.4.1.2 Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi peneliti :Untuk mengembangkan wawasan yang berintelektualitas dan sebagai sarana maupun prasarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh dibangku perkuliahan.

1.4.2.2 Bagi masyarakat: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu tambahan kepada setiap orang yang akan mengembangkan, dan meningkatkan pemberdayaan petani kakao secara efektif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang meneliti terkait Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Petani Kakao Perspektif Hukum Ekonomi Islam Di Batulappa Pinrang Sebagai Berikut:

- 2.1.1 Marni dengan judul “Pembayaran Upah Terhadap Pekerja Kebun Kakao Di Desa Watu Motaha Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka” yang di tulis pada tahun 2013. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembayaran upah terhadap pekerja kebun yang terjadi di masyarakat desa watu motaha, serta tinjauan hukum ekonomi islam terhadap pembayaran upah pekerja kebun kakao.²
- 2.1.2 Heni isnawati dengan judul “peran kelembagaan dalam pemasaran hasil pertanian kakao di desa labokolo kecamatan tiworo tengah kabupaten muna barat” yang ditulis tahun 2016. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi dasar kelembagaan petani, serta peran kelembagaan dalam pemasaran hasil pertanian kakao.³
- 2.1.3 Sony Abner Damamain dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Melalui Program Pemberdayaan Rumput Laut (Studi Kasus Budidaya Rumput Laut Di Desa Sathean) Yang Ditulis Pada Tahun

²Marni, “*Pembayaran Upah Terhadap Pekerja Kebun Kakao Di Desa Watu Motaha Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka*”. Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parerpare.

³Heni Isnawati, “*Peran Kelembagaan Dalam Pemasaran Hasil Pertanian Kakao Di Desa Labokolo Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat*”. Skripsi Sarjana; Fakultas Pertanian: Muna Barat.

2012". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir terkait dengan program budidaya tersebut, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.⁴ Sedangkan peneliti meneliti tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Petani Kakao untuk meningkatkan produktifitas hasil panen di Batulappa.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Ruang Lingkup Peran

Peran (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (*status*). Artinya, seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan suatu peran. Keduanya tak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain tergantung artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran.

Peran yang melekat pada diri seseorang, harus dibedakan dengan posisi atau tempatnya dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat (*social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Sedangkan peran lebih banyak menunjukkan pada fungsi, artinya seseorang yang menduduki suatu posisi tertentu dalam masyarakat dan menjalankan suatu peran. Suatu peran paling sedikit mencakup tiga hal, yaitu:

2.2.1.1 Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat;

⁴Sony Abner Damamain, "Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Melalui Program Pemberdayaan Rumput Laut (Studi Kasus Budidaya Rumput Laut Di Desa Sathean)". (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: 2012), h. 9.

2.2.1.2 Peran adalah suatu konsep ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat; dan

2.2.1.3 Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2.2.2 Fungsi Peran

Adapun fungsi peran dalam membimbing seseorang dalam berperilaku adalah sebagai berikut:

2.2.2.1 Memberikan arah proses sosialisasi

2.2.2.2 Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan

2.2.2.3 Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat dan

2.2.2.4 Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

2.2.3 Jenis-Jenis Peran

Adapun jenis-jenis peran berdasarkan cara memperolehnya, peranan bisa dibedakan menjadi:

2.2.3.1 Peranan bawahan (*ascribed roles*), yaitu peranan yang diperoleh secara otomatis, bukan karena usaha, misalnya peranan sebagai nenek, anak, bupati, dan sebagainya dan

2.2.3.2 Peranan pilihan (*achieved role*), yaitu peranan yang diperoleh atas dasar keputusannya sendiri.

Dari jenis-jenis peranan yang ada dalam masyarakat, kita dapat mengetahui bahwa setiap orang memegang lebih dari suatu peranan, tidak hanya peranan bawahan saja, tetapi juga peranan yang diperoleh melalui usaha sendiri maupun peranan yang ditunjuk oleh pihak lain.⁵

⁵J. Dwi Narwoko, Bagon Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Ed. I (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004), h. 138-141.

2.2.4. Teori Peran Menurut Para Ahli

Dalam teorinya Biddle & Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:

2.2.4.1 Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi social

2.2.4.2 Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut

2.2.4.3 Kedudukan orang-orang dalam perilaku

2.2.4.4 Kaitan antara orang dan perilaku.

2.2.4.5 Berbagai istilah tentang orang-orang

Orang-orang yang mengambil bagian interaksi sosial terdapat dibagi dalam dua golongan sebagai berikut:

2.2.4.1.1 *Aktor* (actor, pelaku): orang-orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu.

2.2.4.1.2 *Target* (sasaran) atau orang lain (*other*): yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya.

Menurut Biddle dan Thomas ada lima istilah tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran:

2.2.4.2.1.1 *Expectation* (harapan).

2.2.4.2.1.2 *Norm* (norma).

2.2.4.2.1.3 *Performance* (wujud perilaku).

2.2.4.2.1.4 *Evaluation* (penilaian) dan *sanction* (sanksi).

2.2.4.2.1.4.1 Harapan Tentang Peran

Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain pada umumnya tentang perilaku-perilaku yang pantas, yang seyogianya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu.

2.2.4.2.1.4.2 Norma (*norm*)

Orang yang sering mengacaukan istilah “harapan” dengan “norma”. Biddle dan Thomas membagi lagi harapan normatif ini ke dalam dua jenis:

2.2.4.2.1.4.2.1 Harapan yang terselubung (*covert*): harapan-harapan itu tetap ada walaupun tidak diucapkan, misalnya: dokter harus menyembuhkan pasien, guru harus mendidik murid-muridnya. Inilah yang disebut norma (*norm*).

2.2.4.2.1.4.2.2 Harapan yang terbuka (*overt*): yaitu harapan-harapan yang diucapkan, misalnya ayah memintah anaknya agar menjadi orang yang bertanggung jawab dan rajin belajar. Harapan jenis ini dinamakan tuntutan peran (*role demand*). Tuntutan peran melalui proses internalisasi dapat menjadi norma bagi peran yang bersangkutan.

2.2.4.2.1.4.3 Wujud Perilaku dalam Peran

Peran diwujudkan dalam perilaku aktor. Berbeda dari norma, wujud perilaku ini adalah nyata, bukan sekedar harapan. Dan berbeda pula pada norma, perilaku yang nyatanya ini bervariasi, berbeda-beda dari satu aktor, ke aktor yang lain. Misalnya peran ayah seperti yang diharapkan oleh norma adalah mendisiplinkan anaknya. Tetapi dalam kenyataannya, ayah yang satu bisa memukul untuk mendisiplinkan anaknya, sedangkan ayah yang lain mungkin hanya menasehati.

2.2.4.2.1.4.4 Penilaian dan Sanksi

Berdasarkan norma itu orang memberikan kesan positif atau negatif terhadap suatu perilaku. Kesan negatif atau positif inilah

yang dinamakan penilaian peran. Di pihak lain, yang dimaksudkan dengan sanksi adalah usaha orang untuk mempertahankan suatu nilai positif atau agar mewujudkan peran diubah sedemikian rupa sehingga yang terjadinya dinilai negatif bisa menjadi positif. Penilaian maupun sanksi menurut Biddle dan Thomas dapat datang dari orang lain (external) maupun dalam diri sendiri (internal). Jika penilaian sanksi datang dari luar, berarti bahwa penilaian dan sanksi terhadap peran itu ditentukan oleh perilaku orang lain. Misalnya seseorang pegawai dinilai baik oleh atasannya dan atasan itu memberi sanksi berupa bonus agar pegawai itu mempertahankan prestasinya yang baik tersebut. Atau kalau pegawai itu dinilai tidak baik oleh atasannya, atasannya akan memberikan sanksi berupa teguran atau peringatan agar ia lebih baik lagi menjalankan perannya.

2.2.4.2.2 Berbagai istilah tentang kedudukan orang dan perilaku

Secord & Backman dan Biddle & Thomas memberikan definisi yang saling melengkapi tentang kedudukan (posisi). Kedua definisi mereka dapat disimpulkan bahwa kedudukan adalah sekumpulan orang yang secara bersama-sama (kolektif) diakui perbedaannya dari kelompok-kelompok yang lain berdasarkan sifat-sifat yang mereka miliki bersama, perilaku yang sama-sama mereka perbuat dan reaksi orang-orang lain terhadap mereka bersama. Dengan demikian ada tiga faktor yang mendasari penempatan seseorang dalam posisi tertentu, yaitu:

2.2.4.2.2.1 Sifat-sifat yang dimiliki bersama seperti jenis kelamin, suku bangsa, usia, atau ketiga sifat itu sekaligus. Makin banyak sifat yang dijadikan dasar kategori kedudukan, makin sedikit orang yang dapat ditempatkan

dalam kedudukan itu. Misalnya, orang yang berada pada kedudukan wanita sama banyaknya dengan pria. Tetapi wanita yang remaja lebih sedikit jumlahnya dan wanita remaja yang bersuku sunda lebih sedikit lagi.

2.2.4.2.2.2 Perilaku sama seperti penjahat (karena perilaku jahat), olahragawan atau pemimpin. Perilaku ini dapat diperinci sehingga memperoleh kedudukan yang lebih terbatas, misalnya penjahat bisa diperinci lagi ke dalam pencopet (perilaku, kejahatannya adalah mencopet).

2.2.4.2.2.3 Reaksi orang lain terhadap mereka. Misalnya reaksi terhadap kelompok yang dikambinghitamkan akan sama saja terlepas dari sifat-sifat dan perilaku kambing hitam itu.

2.2.4.2.3 Berbagai istilah tentang kaitan orang dan perilaku

Biddle dan Thomas mengemukakan bahwa kaitan (hubungan) yang dapat dibuktikan ada atau tidak adanya dan dapat diperkirakan kekuatannya adalah kaitan antara orang dengan perilaku dan perilaku dengan perilaku.⁶

2.2.4.3 Pemerintah Menurut Para Ahli

2.2.4.3.1 Menurut Samuel Edward Finer

Menurut Samuel Edward Finer dalam bukunya yang terkenal *Comparative Government*, mengatakan bahwa pemerintah harus mempunyai kegiatan yang terus-menerus (*process*), harus mempunyai negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), mempunyai pejabat memerintah (*the duty*) dan mempunyai cara, metode serta sistem (*manner, methode, and system*) terhadap rakyatnya.

2.2.4.3.2 Menurut Soemendar

Sebagai badan yang penting (*The Important Body*) dalam rangka pemerintahannya, pemerintah harus memperhatikan ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan, dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan, dan kepentingan

⁶Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Cet. VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 209-220.

masyarakat, pengaruh lingkungan, pengaturan, komunikasi, peran serta legitimasi.⁷

2.2.4.4 Fungsi pemerintah

Ada tiga fungsi pokok ekonomi yang diemban oleh pemerintah yaitu:

2.2.4.4.1 Efisiensi

2.2.4.4.2 Tindakan pemerintah yang menyangkut *efisiensi* berupa segala upaya untuk memperbaiki kegagalan pasar seperti misalnya monopoli.

2.2.4.4.3 Keadilan

Program pemerintah untuk meningkatkan *keadilan* yang mencakup berbagai cara, seperti pemerataan pendapatan agar mencerminkan kepentingan seluruh masyarakat, termasuk golongan miskin dan tertindas.

2.2.4.4.4 Stabilitas

Kebijakan stabilisasi berusaha mengikis fluktuasi tajam dari siklus ekonomi (*Business Cycle*) dengan cara menekan angka pengangguran dan inflasi, serta mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.⁸

2.2.5 Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota.

⁷H.Inu Kencana Syafi'ie, *Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur'an*, (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 5.

⁸Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, *Ekonomi I*, (Cet. II; Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 1985), h. 61.

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (UU RI No. 32 Tahun 2004).⁹

2.2.5.2 Asas Pemerintah Daerah

dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, khususnya pemerintah daerah sangat bertalian erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara, yakni sebagai berikut:

2.2.5.2.1 Asas Sentralisasi

Asas Sentralisasi adalah sistem pemerintahan dimana sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat.

2.2.5.2.2 Asas Desentralisasi

Asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2.5.2.3 Asas Dekonsentrasi

Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertical wilayah tertentu.

2.2.5.2.4 Asas Tugas Pembantuan

Asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah daerah dan/atau dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota

⁹*e-journal.uajy.ac.id/386/3/2EA16576.pdf*. (Diakses Pada Tanggal 17 Maret 2017).

dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk tugas tertentu.

Asas desentralisasi dalam pemerintahan daerah di Indonesia dapat ditanggapi sebagai hubungan hukum keperdataan, dimana terdapat penyerahan sebagian hak dari pemilik hak kepada penerima sebagian hak, dengan obyek tertentu. Pemilik hak pemerintahan adalah di tangan pemerintah, dan hak pemerintahan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, dengan obyek hak berupa kewenangan pemerintah dalam bentuk untuk mengatur urusan pemerintahan, dengan tetap dalam rangka Negara Keatuan Republik Indonesia.

Ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi antara lain bertujuan meringankan beban pekerjaan pemerintahan pusat. Dengan desentralisasi tugas dan pekerjaan diahlikan kepada daerah. Pemerintah pusat dengan demikian dapat memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional atau negara keseluruhan.

Dengan demikian, menurut hemat penulis desentralisasi merupakan asas yang menyatukan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga sendiri daerah itu. Untuk itu semua prakarsa, wewenang dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan diserahkan sepenuhnya menjadi tanggungjawab daerah itu. Adapun tujuan utama yang ingin dicapai melalui kebijaksanaan desentralisasi yaitu:

2.2.5.2.4.1 Tujuan Politik

Tujuan Politik akan akan memposisikan pemerintah daerah sebagai medium pendidikan politik bagi masyarakat ditingkat lokal dan secara *agregat* akan berontribusi pada pendidikan politik secara nasional untuk mencapai terwujudnya *civil society*.

2.2.5.2.4.2 Tujuan Administratif

Tujuan Administratif akan mempromosikan pemerintah daerah sebagai unit pemerintahan di tingkat lokal yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan masyarakat secara efektif, efisien, dan ekonomis yang dalam hal ini terkait dalam pelayanan publik.

Sejalan dengan pendapat tersebut, ide desentralisasi yang terwujud dalam konsep otonomi daerah sangat terkait dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu dalam desentralisasi terdapat 3 (tiga) dimensi utama, yaitu:

2.2.5.2.4.2.1 Dimensi Ekonomi

Dimensi Ekonomi, rakyat memperoleh kesempatan dan kebebasan untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga mereka secara relatif melepaskan ketergantungannya terhadap bentuk-bentuk intervensi pemerintah, termasuk didalamnya mengembangkan paradigma pembangunan yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Dalam konteks ini, eksploitasi sumber daya dilakukan untuk kepentingan masyarakat luas, dilakukan oleh masyarakat lokal.

2.2.5.2.4.2.2 Dimensi Politik

Dimensi Politik, yakni berdayanya masyarakat secara politik, yaitu ketergantungan organisasi-organisasi rakyat dari pemerintah.

2.2.5.2.4.2.3 Dimensi Psikologis

Dimensi Psikologis, yakni perasaan individu yang terakumulasi menjadi perasaan kolektif (bersama) bahwa kebebasan menentukan nasib sendiri menjadi sebuah keniscayaan demokrasi. Tidak ada

perasaan bahwa “orang pusat” lebih hebat dari “orang daerah” dan sebaliknya.¹⁰

2.2.5.3 UU No. 32 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Pasal 16 UU No. 32 Tahun 2014 menjelaskan hubungan dalam bidang pelayanan umum antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang meliputi:

- 2.2.5.3.1 kewenangan tanggung jawab dan ketentuan standar pelayanan nasional.
- 2.2.5.3.2 pengolaksian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah.
- 2.2.5.3.3 fasilitas pelaksanaan kerja sama antar pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum.

2.2.5.4 Pasal 17 UU No. 32 Tahun 2014

Pasal 17 UU No. 32 tahun 2014 menjelaskan hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang meliputi:

- 2.2.5.4.1 Kewenangan, tanggungjawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budi daya, dan pelestarian;
- 2.2.5.4.2 Bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
- 2.2.5.4.3 Pengendalian lingkungan dan tata ruang, serta rehabilitasi lahan.

2.2.5.5 Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lainnya Antarpemerintah Daerah

Adapaun hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintah daerah yang meliputi:

- 2.2.5.5.1 Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya
- 2.2.5.5.2 Kerja sama dan bagi hasil atas manfaat sumber daya lainnya, antarpemerintah daerah, dan

¹⁰*Dianchocho.Blogspot.Com/2013/04/Pengertian-Fungsi-Dan-Asas Pemerintah.* (Diakses Pada Tanggal 17 Maret 2017).

2.2.5.5.3 Pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.¹¹

Perencanaan ini, sebagaimana perencanaan nasional, dikonsentrasikan dalam suatu batas daerah tertentu. Sifat dan ciri-ciri perencanaan kurang lebih sama dengan perencanaan tingkat nasional, hanya ruang lingkungannya jauh lebih kecil, hingga dengan begitu lebih mudah pula dilaksanakan.¹²

2.2.6 Pemberdayaan

2.2.6.1 Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga miskin untuk menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakatnya.

Strategi pemberdayaan yang lengkap menuntut bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dalam menggunakan kekuatannya dipahami, diperhatikan, dan dipecahkan. Kendala-kendala ini berupa struktur yang menindas (kelas, ras/etnis), bahasa, pendidikan, mobilitas, pribadi dan dominasi para elite dalam struktur kekuasaan masyarakat. Perlu dipahami oleh pekerja sosial bahwa pemberdayaan merupakan pekerjaan yang membutuhkan waktu, energi, dan komitmen, serta hasilnya belum tentu memuaskan.¹³

¹¹H. Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta: Rajawali Pers), h. 25.

¹²Firman B. Aji, S. Martin Sirait, *Perencanaan dan Evaluasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 29.

¹³Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat; Wacana dan Praktik*, (Cet. II; Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2014), h. 43.

Ada lima hal penting yang dapat dilakukan pendampingan sosial dalam kegiatan pemberdayaan, yaitu:

2.2.6.1.1 Memberikan Motivasi

Masyarakat khususnya keluarga miskin perlu didorong untuk membentuk kelompok dalam mempermudah pengorganisasian dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat. Langkah berikutnya adalah memotivasi mereka agar dapat terlibat dalam kegiatan pemberdayaan yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan mereka dengan menggunakan kemampuan dan sumber daya yang mereka miliki.

2.2.6.1.2 Peningkatan Kesadaran dan Pelatihan Kemampuan

Peningkatan masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, pemasyarakatan imunisasi, dan sanitasi. Sedangkan untuk masalah keterampilan dapat dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Sementara pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat melalui pengalaman mereka dapat dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar. Langkah ini dapat membantu masyarakat miskin untuk menciptakan sumber penghidupan mereka sendiri dan membantu meningkatkan keterampilan dan keahlian mereka sendiri.

2.2.6.1.3 Manajemen diri

Setiap kelompok yang akan diberdayakan harus mampu memilih atau memiliki pemimpin yang dapat mengatur kegiatan mereka sendiri seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan atau melakukan pencatatan atau pelaporan. Pendampingan dalam tahap awal perlu membantu mereka dalam mengembangkan sebuah sistem, kemudian

memberikan wewenang kepada mereka untuk melaksanakan dan mengatur sistem tersebut.

2.2.6.1.4 Mobilisasi Sumber

Mobilisasi sumber merupakan sebuah metode yang menghimpun setiap sumber-sumber yang dimiliki oleh individu-individu yang dalam masyarakat dalam bentuk tabungan dan sumbangan sukarela dengan tujuan untuk menciptakan modal sosial. Langkah ini didasari pandangan bahwa setiap orang yang memiliki sumber daya yang dapat diberikan dan jika sumber-sumber ini dihimpun, maka nantinya akan dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara substansial.

2.2.6.1.5 Pembangunan dan Pengembangan Jaringan

Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya untuk membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat miskin.¹⁴

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Dalam penelitian ini yang dimaksud pemberdayaan adalah pemberdayaan yang dilakukan terhadap petani kakao sekaligus tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait

¹⁴Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial; Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*, (Cet. I; Jakarta: Rajawali Persada, 2011), h. 265-267.

kedudukannya dalam pemerintahan dalam melayani masyarakat yang kurang berdaya.

2.2.7 Petani

Pertanian merupakan satu jalan untuk mendapatkan penghasilan yang diatur demikian rupa hingga menyusun satu usaha hidup dimana manusia mendapatkan hasil bersama untuk hidup bersama di dalam masyarakat. Pertanian sekalipun pada mulanya merupakan satu usaha yang bebas, tetapi pada akhirnya pun merupakan satu usaha dagang dimana terdapat bermacam tangan yang memanfaatkan hasil dari pada pertanian itu. Namun islampun menjadikan pertanian itu semenjak semula merupakan satu kerja sama untuk kepentingan bersama pula.¹⁵ Sesuai dengan surah Q.S. Yasin /36:33-35.

وَأَيُّهُمْ أَهْمُ الْأَرْضِ الْمَيْتَةِ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا
جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ
أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾

Terjemahannya.

Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. kami hidupakan bumi itu dan kami keluarkan dari padanya biji-bijian, Maka daripadanya mereka makan. dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, Supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur ?¹⁶

2.2.7.1 Pengertian Petani Menurut Para Ahli

2.2.7.1.1 Menurut Eric R. Wolf

Mengemukakan bahwa petani sebagai orang desa yang bercocok tanam di daerah pedesaan, tidak dalam ruangan tertutup di tengah kota. Petani tidak melakukan usaha tani dalam arti ekonomi, ia mengelolah sebuah rumah tangga, bukan sebuah perusahaan bisnis, namun

¹⁵Fuad M. Fachruddin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Salembah Tengah, 1982), h. 108.

¹⁶Departemen Agama RI, Mardani, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 98.

dikatakan pula bahwa petani merupakan bagian dari masyarakat luas dan besar.

2.2.7.1.2 Menurut Fadholi Hermanto

Fadholi Hermanto, memberikan pengertian tentang petani yang mengatakan bahwa: “petani adalah setiap orang yang melakukan usaha untuk memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan kehidupannya dibidang pertanian dalam arti luas yang meliputi usaha tani pertanian, peternakan, perikanan (termasuk penangkapan ikan), dan mengutamakan hasil laut”.

lebih jauh mengungkapkan bahwa petani mempunyai banyak sebutan, anggota fungsi, kedudukan dan peranannya yaitu antara lain sebagai berikut:

2.2.7.1.2.1 petani sebagai pribadi

2.2.7.1.2.2 petani sebagai kepala keluarga/anggota keluarga

2.2.7.1.2.3 petani sebagai guru

2.2.7.1.2.4 petani sebagai pengelola usaha tani

2.2.7.1.2.5 petani sebagai warga sosial kelompok

2.2.7.1.2.6 petani sebagai warga negara.¹⁷

2.2.7.2 Ada tiga unsur penting dalam usaha melaksanakan modernisasi pertanian adalah:

2.2.7.2.1 Penelitian.

2.2.7.2.2 Pendidikan.

2.2.7.2.3 Penyuluh Pertanian.

2.2.7.2.3.1 Kriteria Pertanian Modern

Dengan menentukan kriteria dari setiap unsur, maka akan terbentuk kriteria pertanian modern, yaitu:

¹⁷infodanpengertian.blogspot.co.id › Pertanian. (Diakses Pada Tanggal 07 April 2017).

- 2.2.7.2.3.1.1 Proses Produksi merupakan proses biologis tanaman. Banyak cara ilmiah yang digunakan untuk membantu agar proses produksi berjalan baik dan hasilnya lebih banyak.
- 2.2.7.2.3.1.2 Unsur Petani. Petani adalah sebagai juru tani dalam usaha taninya harus senantiasa mampu menggunakan teknik yang baru. Petani sebagai manajer harus mampu menganalisis berbagai jenis usaha tani yang dilakukan termasuk perhitungan input-output usaha tani.
- 2.2.7.2.3.1.3 Unsur Usaha Petani. intensifikasi dalam bercocok tanam dan pengerjaan tanah adalah salah satu kegiatan petani. Bangunan yang berdiri di atas tanah, seperti rumah, gudang, kandang, dan lain sebagainya harus diatur menurut tata cara yang ada.
- 2.2.7.2.3.1.4 Unsur usaha tani sebagai perusahaan. Dalam pertanian modern, tidak saja usaha tani digunakan untuk konsumsi peribadi, tetapi sudah menjerumus kepada usaha komersial. Pada saat ini, sudah ada usaha tani yang tujuannya adalah perdangan.¹⁸

2.2.7.3 Subsistensi Kaum Petani

Pertumbuhan negara kolonial dan komersialisasi pertanian yang membawahkan masyarakat petani ke dalam ekonomi dunia telah memperumit dilema keterjaminan subsistensi kaum petani. Hal ini disebabkan sekurang-kurangnya oleh lima cara:

- 2.2.7.3.1 Ketidakstabilan yang bersumber dari pasar
- 2.2.7.3.2 Perlindungan desa yang semakin lemah
- 2.2.7.3.3 Hilangnya sumber daya subsistensi sekunder
- 2.2.7.3.4 Buruknya hubungan kelas agraris

¹⁸Suwarsono Heddy, *Agroekosistem; Masalah dan Solusinya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 170-171.

2.2.7.3.5 negara kolonial yang semakin ekstensif dan intensif dalam memungut pajak.¹⁹

2.2.8 Hukum Ekonomi Islam

Hukum Ekonomi Islam adalah ekonomi yang memiliki empat nilai utama, yaitu *rabbaniyyah*, akhlak, kemanusiaan, dan pertengahan, di mana nilai-nilai ini menggambarkan kekhasan atau keunikan yang utama bagi ekonomi Islam.

2.2.8.1 Nilai-Nilai Ekonomi Islam

Adapun nilai-nilai ekonomi Islam itu adalah:

2.2.8.1.1 Ekonomi Ilahiyyah, karena titik awalnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariat-Nya. Kegiatan ekonomi, baik produksi, konsumsi, penukaran, dan distribusi, dikaitkan pada prinsip Ilahiyyah dan pada tujuan Ilahiyyah.

2.2.8.1.2 Ekonomi Akhlak, bahwa ekonomi Islam memadukan antara ilmu dan akhlak, karena akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan Islami.

2.2.8.1.3 Ekonomi Kemanusiaan, ekonomi Islam adalah ekonomi yang berwawasan kemanusiaan, mengingat tidak ada pertentangan antara aspek Ilahiyyah dengan aspek kemanusiaan, karena menghargai kemanusiaan adalah bagian dari prinsip Ilahiyyah yang memuliakan manusia dan menjadikannya sebagai Khalifah di muka bumi ini. Jika prinsip ekonomi Islam berlandaskan kepada Al-Qur'an dan sunnah, yang merupakan nash-nash Ilahiyyah, maka manusia adalah pihak yang mendapatkan arahan (*mukhathah*) dari *nash-nash* tersebut.

2.2.8.1.4 Ekonomi Pertengahan, artinya bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan pada prinsip pertengahan dan keseimbangan yang

¹⁹Damsar, Indrayani, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2009), h. 234-236.

adil. Islam menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, antara individu dan masyarakat. Di dalam individu diseimbangkan antara jasmani dan rohani, antara akal dan hati, antara realita dan fakta.²⁰

2.2.8.2 Pengertian Ekonomi Islam Menurut Para Ahli

Umar Chapra, ilmu ekonomi islam adalah suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui salah satu alokasi dan distribusi sumberdaya alam yang langka yang sesuai dengan maqashid, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkesinambungan, membentuk solidaritas keluarga, sosial dan jaringan moral masyarakat.²¹

2.2.8.3 Sistem ekonomi

Terdapat tiga unsur yang keberadaannya menjadi karakteristik dari sistem ekonomi yang bersangkutan, yakni sebagai berikut.

2.2.8.3.1 Produksi

Produksi dapat diartikan dengan upaya manusia menciptaka kekayaan dengan cara memanfaatkan sumber alam. Dalam produksi terdapat empat faktor yang paling penting yaitu faktor alam, tenaga kerja, modal, dan manajemen. Adapun faktornya sebagai berikut:

2.2.8.3.1.1 Faktor Alam:Faktor alam adalah faktor dasar dalam prooduksi. Alam yang dimaksud di sini adalah bumi dan segala isinya, baik yang diatas permukaan bumi, maupun yang terkandung dalam bumi itu sendiri.

²⁰H. Vieithzal Rivai, H. Andi Buchari, *Islamic Economics; Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*, (Cet. II; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h. 91-93.

²¹M. Nur Rianto Al Arif, Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi; Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Cet. II; Jakarta: PT. Interpretama Fajar Mandiri, 2014), h. 19.

2.2.8.3.1.2 Tenaga Kerja: Tenaga kerja merupakan faktor pendayaguna dari faktor produksi sebelumnya, yakni faktor alam.

2.2.8.3.1.3 Faktor Modal: Faktor modal Dalam hal ini dapat diartikan dengan kekayaan yang memberikan penghasilan kepada pemiliknya atau dapat berarti pula sebagai sarana produksi yang menghasilkan.

2.2.8.3.1.4 faktor produksi manajemen: Manajemen dalam ekonomi menurut Stoner, berarti proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya, sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

2.2.8.3.2 Distribusi

Distribusi merupakan kegiatan ekonomi lebih lanjut dari kegiatan produksi. Hasil produksi yang diperoleh kemudian disebar dan dipindahtangankan dari satu pihak ke pihak lain.

2.2.8.3.3 Konsumsi

Konsumsi bisa berarti mengambil manfaat atau menggunakan barang-barang jadi dari hasil produksi.²²

²² H. A. Djazuli, Adi Anwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Uma; Sebuah Gagasan*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), h. 26-34.

2.3 Tinjauan Konseptual (Penjelasan Judul)

2.3.1 Peranan

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.²³

2.3.2 Pemerintah Daerah

Pemerintah merupakan pihak yang bertugas mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan masyarakat dapat tertanggulangi jika pemerintah merancang kebijakan investasi demi pengelolaan dan peningkatan sumber daya nasional. Kemiskinan bisa dan biasa disertai dengan gejala pengangguran. Orang yang menganggur menderita kemiskinan karena tidak punya nafkah yang bisa diperoleh dari pekerjaan.²⁴

2.3.3 Pemberdayaan (*empowerment*)

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.

2.3.4 Petani Kakao

Petani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan

²³Soerjono Soekanto, *Sosiologi; Suatu Pengantar*, (Cet. 17; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 268.

²⁴H. Soeharsono Sagir, *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 68.

dan memelihara tanaman (*seperti padi, bunga, buah dan lain-lain*), dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain.²⁵ Sedangkan Kakao (*Theobroma Cacao L.*) merupakan salah satu komoditas andalan perkebunan yang peranannya cukup penting bagi perekonomian nasional, khususnya sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan dan devisa negara. Disamping itu kakao juga berperan dalam mendorong pengembangan wilayah dan pengembangan agroindustri.²⁶

2.3.5 Hukum Ekonomi Islam

Hukum Ekonomi Islam adalah pengetahuan bagaimana menggali dan mengimplementasi sumber daya material untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia, dimana penggalian dan penggunaan itu harus sesuai dengan syari'at islam.²⁷

2.4 Bagan Kerangka Pikir

2.4.1 Peran merupakan seseorang yang telah menjalankan tugasnya seseorang yang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan suatu peran. Kududukan tak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain tergantung artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran.

2.4.2 Pemerintah Daerah merupakan sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan sebagai personifikasi dari kekuasaan. Dalam hal ini,

²⁵<https://id.wikipedia.org/wiki/Petani>. (Diakses Pada Tanggal 10 April 2017).

²⁶ <https://budidayatanaman-perkebunan.blogspot.co.id/2014/09/budidaya-tanaman-kakao-1.html>. (Diakses Pada Tanggal 10 April 2017).

²⁷ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam; Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 3.

pemerintah tersebut mempunyai tanggung jawab dalam hal pemberdayaan masyarakat.

2.4.3 Perilaku adalah tindakan atau aktivitas manusia itu sendiri yang mempunyai hubungan dengan aktor dan pelakunya baik itu diamati secara langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar sesuai dengan peran tertentu.

2.4.4 Harapan adalah harapan-harapan orang lain pada umumnya tentang perilaku-perilaku yang pantas, yang seyogianya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu.

2.4.5 Norma adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Ketentuan tersebut mengikat bagi setiap manusia yang hidup dalam lingkungan berlakunya norma tersebut. Dalam arti setiap orang yang hidup dalam lingkungan berlakunya norma tersebut harus mentaatinya. Dibalik ketentuan tersebut ada nilai yang menjadi landasan bertingkah laku bagi manusia. Misalnya, dokter harus menyembuhkan pasien, guru harus mendidik murid-muridnya inilah yang disebut norma.

2.4.6 Wujud perilaku adalah wujud perilaku yang bukan sekedar harapan, tetapi wujud perilaku tersebut adalah nyata. Misalnya peran ayah seperti diharapkan oleh norma adalah mendisiplinkan anaknya, tetapi dalam kenyataannya, ayah yang satu bisa memukul untuk mendisiplinkan anaknya, sedangkan ayah yang lainnya mungkin hanya menasehati.

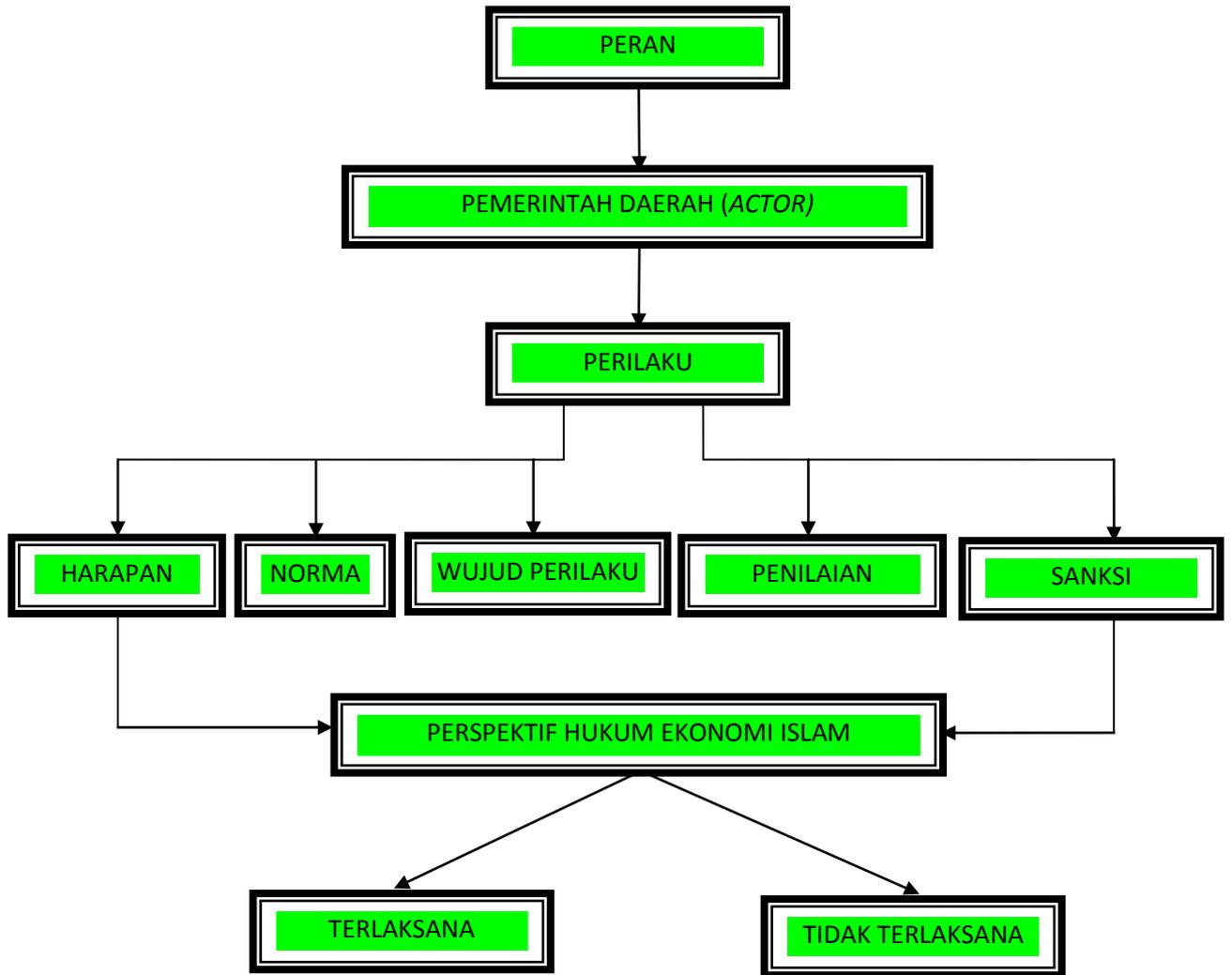
2.4.7 Penilaian merupakan kesan positif atau negatif terhadap sesuatu perilaku yang dinamakan penilaian peran.

2.4.8 sanksi adalah usaha orang untuk mempertahankan suatu nilai positif atau agar mewujudkan peran diubah sedemikian rupa sehingga terjadinya dinilai negatif bisa menjadi positif. Misalnya, seseorang pegawai dinilai

baik oleh atasannya dan atasan itu memberi sanksi berupa bonus agar pegawai itu mempertahankan prestasinya yang baik tersebut. Atau kalau pegawai itu dinilai tidak baik oleh atasannya, atasannya akan memberikan sanksi berupa teguran atau peringatan agar ia lebih baik lagi menjalankan perannya.

Adapun penjelasan dari kerangka fikir adalah peran merupakan tugas seseorang yang menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan perannya. Khususnya pemerintah daerah sebagai aktor yang mampu mengelolah kewenangan lembaga yang merupakan kewenangan tanggung jawab dalam memberdayakan masyarakat maupun melayani kebutuhan rakyat dan membimbing para petani kakao di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. Dimana, peneliti akan mencari informasi mengenai bagaimana bentuk wujud perilaku yang sebenarnya pemerintah daerah dalam hal ini dinas perkebunan dan kehutanan mulai dari harapan yang ingin diwujudkan oleh petani kakao sampai apa sanksi sebenarnya ketika pemerintah daerah menjalankan peran yang dikoordinasikan oleh atasannya. Selanjutnya peneliti akan juga mengamati secara Perspektif Hukum Ekonomi Islam terlaksana atau tidak terlaksananya peran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memberdayakan petani kakao di Kec. Batulappa Kab. Pinrang tersebut.

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini peneliti membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.²⁸ Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan ini diharapkan temuan-temuan empiris dapat dideskripsikan secara lebih rinci, lebih jelas, dan lebih akurat, terutama berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan petani, khususnya perilaku (tindakan) pemerintah daerah dalam merepon kebijakan struktural maupun dalam mengelola lahan pertanian tersebut. Untuk itu, saya menggunakan pendekatan fenomenologi, yang diharapkan dapat membantu penelitian dalam: *pertama* pengamatan, *kedua* imajinasi, *ketiga* berfikir secara abstrak, serta *keempat* dapat merasakan atau menghayati fenomena di lapangan penelitian.²⁹

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun waktu untuk melakukan penelitian yaitu \pm 2 bulan.

²⁸Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah(Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

²⁹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 147.

3.3 Fokus Penelitian

3.3.1 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengarah pada peran, dan perilaku yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memberdayakan petani kakao di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Sumber data dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (narasumber).³⁰ Adapun data tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.³¹ Teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber yaitu menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan yang biasa disebut dengan teknik *purposive sampling*. Narasumber tersebut terdiri Pemerintah Daerah Dari Dinas Peternakan Dan Perkebunan Kab. Pinrang, Petani Kakao, Dan Kelompok Tani Kakao.

³⁰Bagong Suyanto, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, Ed. I (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 55.

³¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu teknik *field research*: teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang memuat apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan peneliti pada saat melakukan penelitian di lapangan.³² Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data melalui penelitian lapangan ini yakni sebagai berikut:

3.5.1 Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.³³ Dalam hal ini, peneliti akan mengamati secara langsung di lokasi penelitian untuk mengamati masalah-masalah yang berkaitan dengan apa yang menjadi permasalahan yang akan diteliti.

3.5.2 Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³⁴ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

³²Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 164.

³³Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, h. 63.

³⁴Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Cet. 11; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h. 83.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.³⁵ Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi ini lebih banyak menggunakan metode alam level mikro, yaitu bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan, dan analisis hasil penelitian. Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan lebih akurat apabila juga digunakan wawancara atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut.³⁶ Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

3.6.1 Peneliti akan melakukan wawancara yang mendalam kepada informan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Selain itu, peneliti melakukan pula observasi partisipasi untuk mengumpulkan data yang lebih banyak tentang permasalahan tersebut.

³⁵Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), h. 158.

³⁶Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Cet. VIII; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 203.

Kemudian data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi tersebut dikumpulkan dan dianalisis.

- 3.6.2 Setelah itu, peneliti akan melakukan uji silang terhadap data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi untuk memastikan bahwa tidak ada data dan informasi yang bertentangan antara hasil wawancara dengan hasil observasi tersebut.
- 3.6.3 Menguji kembali informasi-informasi sebelumnya yaitu informasi dari informan atau dari sumber lainnya. Kemudian peneliti akan menggunakan bahan dokumentasi yang telah diperoleh dari pihak terkait untuk mengoreksi keabsahan data atau informasi yang telah diperoleh dari wawancara dan observasi tersebut.
- 3.6.4 Penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan membuang data-data yang kurang penting sehingga kesimpulan yang dihasilkan adalah kesimpulan yang tepat dan sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini penulis akan mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan baik itu berupa interview (wawancara) maupun observasi hal-hal yang dimaksud ialah:

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Asal Mula dan Sejarah Kabupaten Pinrang

Cikal bakal kabupaten pinrang berasal dari *Onder Afdelling* pinrang yang berada di bawah *afdeling* parepare, yang merupakan gabungan empat kerajaan yang kemudian menjadi *self bestuur* atau swapraja, yaitu KASSA, BATULAPPA, SAWITTO, dan SUPPA yang sebelumnya adalah anggota konfederasi kerajaan *Massenrengpulu* (Kassa dan Batulappa) dan *ajatappareng* (Suppa dan Sawitto). Hal ini merupakan bagian dari adu domba kolonial untuk memecah persatuan di Sulawesi Selatan. Pemilihan nama pinrang sebagai nama wilayah dikarenakan daerah pinrang merupakan tempat berkumpulnya keempat raja tadi dan sekaligus tempat berdirinya *kantoor onder afdelingeen* (kantor residen). Selanjutnya *Onder Afdeling* pinrang pada zaman pendudukan jepang menjadi Bunken Kanrikan Pinrang dan pada zaman kemerdekaan akhirnya menjadi menjadi Kabupaten Pinrang.

Sebagaimana diketahui bahwa ketika jepang masuk di Pinrang sekitar tahun 1943, sistem pemerintahan warisan kolonial dengan struktur lengkap yang terdiri dari 4 (empat) swaparaja, masing-masing Swaparaja Sawitto, Swaparaja Batulappa, Swaparaja Kassa, Swaparaja Suppa. Ketika Pinrang menjadi *Onder*

Afdeling di bawah *afdeling* parepare, sementara *Afdeling* parepare adalah salah satu dari tujuh *afdeling* yang ada di provinsi Sulawesi Selatan.

Ada beberapa versi mengenai asal muasal pemberian nama pinrang yang berkembang di masyarakat Pinrang sendiri. Versi yang pertama menyebut bahwa pinrang berasal dari bahasa bugis, yaitu kata “*Benrang*” yang berarti air “*Genangan*” bisa juga berarti “*Rawa-Rawa*” hal ini disebabkan oleh karena pada awal pembukaan daerah pinrang yang tepatnya saat ini di pusat Kota Kabupaten Pinrang masih berupa daerah rendah yang sering tergenang dan berawah. versi kedua menyebutkan bahwa hal ini sebabkan karena suatu ketika Raja Sawitto yang bernama La Palateang, bebas dari pengasingan dari kerajaan Gowa berkat bantuan *To Barani Pole’ Kassa* di sambut gembira oleh rakyatnya, namun mereka terheran-heran karena wajah sang raja berubah dan mereka berkata “*Pinra Bawangngi Tappana Puatta Pole Gowa*”, yang artinya berubah saja mukanya tuan kita dari gowa. Maka setelah itu rakyat mulai menyebut daerah tersebut sebagai pinra yang artinya berubah, dikemudian hari masyarakat setempat mengubah penyebutan tersebut menjadi pinrang.³⁷

Tersebutlah suatu peristiwa di Sawitto, pada waktu pemerintahan La Paleteang Raja IV, di Kerajaan Sawitto, Sulawesi. Pada waktu itu terjadi peperangan antara Sawitto dan Gowa. Peran ini terjadi karena Gowa sebagai kerajaan besar, berusaha untuk menguasai Sawitto yang kondisi dan potensinya menjajikan setumpuk harapan. Berbagai upaya yang telah digunakan Gowa untuk menguasai Sawitto melalui agresi dan terjadilah peran antara Sawitto dan Gowa

³⁷Bappeda, Sejarah Berdirinya Kabupaten Pinrang, <http://www.bappeda.pinrangkab.go.id/profil-4-Sejarah%20Singkat> (01 Agustus 2017).

sekitar tahun 1540. Prajurit-prajurit Sawitto dengan gigih mengadakan perlawanan abdi kerajaan mati-matian mempertahankan dan membela bumi ini berkesudahan dengan kekalahan di pihak Sawitto sehingga raja La Paleteang dan istrinya di bawa ke Gowa sebagai tanda kemenangan Gowa atas Sawitto. Awan meliputi kesedihan rakyat atas kepergian sang raja yang arif dan bijaksana.

Berbagai dilakukan untuk membebaskan sang raja bersama permaisuri Kerajaan Sawitto. Akhirnya dalam satu musyawarah kerajaan terpilih dua to barani, yaitu to lengo dan to kipa untuk mengembang tugas membebaskan sang raja beserta permaisurinya. Kemudian berangkatlah kedua bersaudara tersebut ke Gowa yang berhasil membawa pulang raja La Paleteang beserta permaisurinya. Kedatangan raja bersama permaisurinya di sambut dengan luapan kegembiraan dan di elu-elukan sepanjang jalan ke istana. Di balik kegembiraan itu, mereka terharu melihat kondisi sang raja yang banyak mengalami perubahan seraya mengatakan “PINRA KAN MI TAPPA NA DATUE POLE RI GOWA”, yang artinya wajah raja mengalami perubahan sekembali dari Gowa. Kata-kata inilah senantiasa terlontar dari orang-orang yang meyertai sang raja. Ketika raja beristirahat sejenak sebelum tiba di istana bertitahlah sang raja kepada pengantarnya untuk menyebut tempat tersebut dengan nama pinra.

Sumber lain mengatakan pemukiman kota pinrang yang dahulunya rawa-rawa yang selalu tergenang air membuat masyarakat senantiasa berpindah-pindah mencari wilayah pemukiman yang bebas genangan air, berpindah-pindah atau berubah-ubah pemukiman dalam bahasa bugis disebut “Pinra-Pinra Onroang”. Setelah masyarakat menemukan tempat pemukiman yang baik, maka tempat

tersebut di beri nama: PINRA-PINRA. Dari kedua sejarah berbeda itu lahirlah yang sama, yaitu “Pinra”. Kemudian kata itu dalam perkembangannya di pengaruhi oleh intonasi dialek bahasa bugis sehingga menjadi Pinrang yang sekarang ini di abadikan menjadi nama dari Kabupaten Pinrang.

4.1.2 Letak Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang

Pada masa sebelum kemerdekaan kecamatan batulappa adalah nama kerajaan dalam gabungan kompederasi Masenrengpulu bersama dengan Enrekang, Duri, Maiwa, Kassa. Beritah La Toallala Puang Tumane Arung Endekang “Iyatu Kassa na Batulappa... Endekang Ambena, Sawitto Indona”. Batulappa di tetapkan menjadi suapraja/self bestur di zaman invasi jepang, Batulappa berbentuk bunken kenrikan.

Lokasi penelitian yang dilakukan di Kecamatan Batulappa yang dimana kecamatan ini terletak secara geografis kecamatan batulappa memiliki luas wilayah mencapai 168.99 Km yang terletak kurang lebih 23 Km disebelah utara ibu kota Kabupaten Pinrang. Batas wilayah kabupaten ini adalah:

Sebelah Utara : Kecamatan Lembang,

Sebeleah Timur : Kabupaten Enrekang,

Sebelah Barat : Kecamatan Duampanua,

Sebelah Selatan : Kecamatan Patampanua.

Setelah kemerdekaan wilayah Kecamatan Batulappa pecah dan menjadi Duampanua karena banyaknya penduduk maka Kecamatan Batulappa dimekarkan pada tanggal 7 April 2011. Adapun wilayah administrasi Kecamatan Batulappa

terdiri dari 1 kelurahan dan 4 desa, yaitu Kelurahan Kassa, Desa Tapporang, Desa Watang Kassa, Desa Batulappa, dan Desa Kaseralau.

Kondisi geografis ini pada umumnya berbukit-bukit dengan ketinggian menjadi tiga sekmentasi sebagai berikut: 100-1000 Meter, dan 1000 Meter ke atas. Dengan dasar sekmentasi menurut ketinggian tersebut maka Kecamatan Batulappa dominan mempunyai ketinggian 100-1000 Meter diatas permukaan laut merupakan luas wilayah ketinggian dan memiliki pola mengelompok secara persial dan dominan berada dibagian timur yang membentang mulai dari bagian selatan ke utara. wilayah dari 1000 Meter ditemukan dengan luas yang signifikan yang hanya ditemukan diwilayah Desa Kaseralau dimana wilayah tersebut berbatasan langsung dengan Kabupaten Enrekang.³⁸

4.1.3 Kondisi Masyarakat di Kecamatan Batulappa Kab. Pinrang

Berdasarkan pengamatan yang di peroleh oleh penulis, kondisi kecamatan Batulappa merupakan daerah yang sangat trofis pada umumnya banyak masyarakat yang melakukan kegiatan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti Petani, PNS, Pedagang, Tukang Ojek, dan Sebagainya.

Masyarakat tani di Kecamatan Batulappa masih memiliki beberapa budaya yang masih dilakukan hingga saat ini. Budaya tersebut seperti gotong royong, mekakukan Tradisi Bugis, yaitu *Mappadendang*, dan lain-lain. Pola kepemimpinan yang ada di masyarakat di Kecamatan Batulappa adalah masyarakat disana masih sangat menghormati pemimpin mereka baik pemimpin secara formal maupun non formal. Namun walaupun demikian keadaan

³⁸Profil Kantor Kecamatan Batulappa. (Tanggal 01 Agustus 2017).

masyarakat disana sangat mudah untuk menerima kehadiran orang luar. Kemauan untuk menerima sesuatu yang barupun sangat baik. Sebagian besar petani di Kecamatan Batulappa adalah Petani Padi, Petani Jagung, dan Petani Kakao. Namun selain itu terdapat juga yang mengusahakan tanaman lain seperti kacang tanah, sayuran, buah-buahan, cangkeh, kelapa, marica, lada, dan sebagainya. Tidak semua tanaman tersebut diusahakan di lahan sawah, Namun ada yang diusahakan di lahan perkebunan maupun pekarangan.

Penjualan hasil usaha tani dilakukan secara kolektif maupun individu oleh para petani. Penjualan hasil pertanian dapat dilakukan kepada tengkulak ataupun dijual ke kelompok tani kakao yang berada di Kecamatan Batulappa Kab. Pinrang. Tapi bukan dari daerah Pinrang. Jadi yang menjual kakao petani itu dari Palopo bukan dari daerah Kec. Batulappa. Hasil pertanian yang dijual sebagian besar merupakan hasil dari tanaman budidaya di sawah, jagung, dan kakao. Sedangkan untuk tanaman pekarangan hanya digunakan untuk dikonsumsi sendiri atau di jual sebagai tambahan ekonomi sementara, walaupun ada pula yang menjual hasil tanaman dari pekarangan seperti tanaman mangga, rambutan, jeruk, dan lansat. Namun cukup untuk menafkahi keluarganya.

Untuk hasil pertanian yang baik, petani menggantungkan sepenuhnya pada keadaan alam, semua jenis pertanian akan selalu bergantung pada alam. Hal inilah yang dirasakan oleh petani kakao di Kecamatan Batulappa maupun dari desa lainnya. ketika menghadapi akan mempengaruhi kualitas tanaman kakao. Selaian penjualan hasil, Sarana perhubungan di Kecamatan batulappa sudah berupa jalan aspal semen, dengan kondisi jalan masih baik. Namun ada beberapa jalan yang

rusak, seperti jalanan menuju perkebunan kakao dari Desa Tapporang Menuju Desa Kaseralau yang perbukitannya sangat terjang dan bahaya bagi masyarakat melewati daerah itu. Kemudian, Demikian juga daerah pegunungan yang memiliki jarak relatif jauh dengan perkotaan, maka Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang seluruhnya telah terdapat fasilitas listrik, dan sarana komunikasi berupa telepon. Namun masih banyak yang perlu dibenahi oleh pemerintah daerah.

4.1.4 Jumlah Penduduk Kec. Batulappa kab. pinrang

Jumlah penduduk atau kelompok yang terbentuk dalam sebuah keluarga sebagai sarana atau sebagai akibat digunakannya proses reproduksi seksual untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan keluarga *sakinah mawaddah warahma*. Jumlah kependudukan ini merupakan salah satu factor yang dapat mempengaruhi kemampuan kerja dan juga sangat menentukan dalam kualifikasi pembagian kerja. Penduduk mulai dari Desa Tapporang samapai ke desa kaseralau terdiri atas 3.622 KK dengan total jumlah jiwa 13.698 orang. Berikut jumlah perbandingan jumlah kependudukan laki-kaki dan perempuan.

Tabel 4.1.4.1 Jumlah penduduk berdasarkan jumlah laki-laki dan perempuan yang masih hidup di Kec. Batulappa Kab. Pinrang

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
6.925	6.773	13.698

Sumber data: Profil Kantor Camat Batulappa Pinrang

Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah penduduk antara laki-laki dengan perempuan terdapat perbedaan yang tidak terlalu signifikan. Dimana jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak 6.773 jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki yaitu sebanyak 6.925 jiwa.

4.1.5 Status Pendidikan

Pendidikan sekarang telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah seperti salah satu program pemerintah, yaitu wajib belajar selama sembilan tahun yaitu mulai dari SD hingga SMP, program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengetahuan masyarakat hingga menciptakan seseorang yang berkualitas, berkarakter, dan memiliki pandangan yang luas kedepan untuk mencapai suatu cita-cita yang diharapkan, serta mampu beradaptasi secara cepat di dalam berbagai lingkungan. Karena pendidikan itu sendiri memotivasi diri untuk menjadi lebih baik dalam segala aspek kehidupan. Namun masyarakat yang berada di Kecamatan Batulappa Kab. Pinrang rata-rata berpendidikan dan kebanyakan dari petani yang berada di Kecamatan Batulappa pernah mengenyam pendidikan baik dari SD, SMP, SMA sampai dengan Sarjana.

4.2 Peran Pemerintah Daerah Memberikan Pelatihan Dibidang Praktik Perkebunan Kakao Dalam Meningkatkan Pengetahuan Petani Di Batulappa Pinrang

Peran pemerintah daerah dalam hal ini dinas peternakan dan perkebunan kabupaten pinrang, yaitu berperan untuk membimbing dan membina para petani kakao maupun kelompok tani kakao yang ada di kec. Batulappa kab. Pinrang.

Salah satu perwujudan pemerintah daerah adalah memberikan bimbingan kepada petani kakao dengan cara mengendalikan hama dan penyakit. Kewajiban pemerintah daerah memberikan motivasi kepada petani kakao sehingga terwujudnya karakter para petani yang lebih baik dari pada sebelumnya. Sehubungan program pemerintah daerah dengan kerjasama petani kakao perlu

dilaksanakan SLPHT (Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu) skala luas. Tujuan dari pelaksanaan SLPHT (Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu), yaitu Meningkatkan pengetahuan petani tentang pengendalian hama terpadu berbasis praktik, dan Meningkatkan kemauan petani dalam mengendalikan hama secara kelompok.

Hal ini yang rasakan Bapak. Syamsul Alam sebagai petani kakao :

pemerintah disini bekerjasama dengan petani kakao yang melakukan SL (Sekolah Lapang). Mengenai peran pemerintah daerah dalam meningkatkan pemberdayaan petani kakao disini mendukung. kalau tanggung jawabnya pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan petani kakao belum sepenuhnya tapi sudah ada yang dilakukan. karena yang menjadi masalah disini bagaimana pemerintah memfasilitasi hasil dari petani ini karena pemerintah itu perantara masyarakat dengan eksportir. Pemerintah itu harus fokus ke pasca panen karena yang membeli barang petani itu tengkulak selain itu coklat di indonesia sekarang turun 30% pertahunnya. Dulu itu coklat di kab. Pinrang 500 ton sekarang turun menjadi 300 ton. Jadi pemerintah belum maksimal. Jadi masalah utama petani ini harga yang murah, susah mengendalikan hama, dan fasilitas yang masih kurang Seperti saluran pipa air menuju perkebunan para petani kakao.³⁹

Adapun tugas dan tanggung jawab pemerintah seperti memberikan pelatihan menanam kakao, memupuk, memangkas, dan memanen. SLPHT ini bertujuan untuk menyekolahkan petani untuk meningkatkan pengetahuannya, seperti memberikan pengetahuan tentang hama PBK (Penggerek Buah Kakao), dan penyakit yang dapat mengurangi pertumbuhan, serta pembuahan kakao. Hama adalah penyakit yang sering memakan perkebunan kakao. Pada pertumbuhan tanaman kakao terdapat kendala yang harus diwaspadai yaitu hama dan penyakit yang menyerang tanaman kakao tersebut. Hama utama kakao, yaitu:

³⁹ Syamsul Alam, Petani Kakao, Wawancara, 01 Agustus 2017 Di Bamba Kel. Kassa

4.2.1 Penggerek buah kakao (PBK) adalah serangan hama penggerek buah kakao termasuk golongan ngengat atau sejenis serangga. Serangga ini melakukan perkembangbiakan dengan meletakkan telurnya pada buah kakao yang memiliki alur paling banyak pada permukaannya dengan ukuran panjang yang lebih dari 5 cm. Apabila telah menetas berbentuk larva, larva tersebut langsung melakukan penetrasi kedalam buah, dan apabila telah mencapai biji, larva akan menggerek dan makan permukaan dalam kulit buah, daging buah, dan terkadang juga memakan bagian kulit biji kakao yang sedang berkembang. Akibat dari serangan larva ini akan membuat biji lengket satu sama lain, larva ini juga membuat ukuran biji menjadi kecil karena tidak lagi berkembang dengan demikian akan mengakibatkan penurunan kuantitas dan kualitas biji. Pengendalian hama yang dilakukan oleh petani di kec. Batulappa kab. Pinrang yaitu dengan melakukan pemangkasan. Dengan pemangkasan yang baik maka cahaya matahari akan masuk ke bagian tanaman, sirkulasi udara baik serta air hujan juga dapat masuk ke bagian tanaman lainnya. Kondisi ini tidak disenangi oleh hama PBK dan akan berpindah pada kebun yang tidak melakukan pemangkasan.

4.2.2 Babi hutan bagian dari Hama babi hutan juga sering menyerang tanaman kakao. Hama babi hutan ini menimbulkan kerusakan pada kulit kakao yang tidak beraturan karena biji kakao dimakan oleh babi hutan. Pengendalian hama yang sering dilakukan oleh petani di kec. Batulappa kab. Pinrang ini yaitu dengan melakukan perburuan secara gotong royong dengan

menggunakan anjing peliharaannya sebagai penjaga lahan perkebunan kakao.

4.2.3 Penyakit Kanker Batang pada penyakit ini biasanya muncul gejala kulit batang yang kehitaman dan sering terdapat cairan kemerahan yang kemudian tampak seperti lapisan karat. Jika kulit lapisan luar dibersihkan maka tampak lapisan dibawahnya membusuk dan berwarna merah anggur. Biasanya penyebaran penyakit kanker batang sama dengan penyebaran penyakit busuk buah. Penyakit kanker batang terjadi karenavirus yang menginveksi buah menjalar melalui tangkai buah mencapai batang. Penyakit ini sering timbul pada daerah yang curah hujannya tinggi atau pada kebun yang sering tergenang air. Pengendalian penyakit ini dilakukan dengan cara membuka kulit batang yang membusuk sampai batas kulit yang sehat.

Nurman salah satu kelompok tani kakao di Bamba kel. Kassa mengatakan:

yaku te diberikan ka pelatihan matanang koko, mapupu, mapparong pole pemerintah, supaya de'eng ku kusseng, apa sabana, sa na pasikkola ki tu pemerintah. Tapi yaku te'e melota a de'eng bantuan pole pemerintah pada tu bantuan petani sawah seperti pupuk, racun na dompeng. Kendala na te'e petani pole pemerintah daerah masempo tu coklat, na kami te'e melona masuli tu coklat.⁴⁰

Seperti yang dikatakan oleh responden diatas bahwa kelompok tani tersebut diberikan pelatihan praktik perkebunan kakao berupa cara menanam kakao, memupuk, dan memangkas supaya petani lebih banyak mengetahui praktik perkebunan kakao yang diberikan pemerintah daerah karena petani kakao tersebut disekolahkan dalam bentuk pemberian SLPHT oleh pemerintah daerah. Dengan

⁴⁰ Nurman, Kelompok Petani Kakao, Wawancara 01 Agustus 2017 Di Bamaba Kel. Kassa

adanya SLPHT petani bisa meningkatkan kualitas kakaonya. Pemerintah daerah harus bertanggungjawab dalam memberikan praktik perkebunan kakao dengan melakukan SLPHT (Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu) supaya petani kakao bisa meningkatkan pengetahuan dan menghasilkan kakao yang banyak. selain dari tanggungjawab, pemerintah daerah memberikan bantuan berupa bibit, pupuk, dan peralatan lainnya. Dengan kata lain, petani kakao diberikan bantuan sama seperti diberikan bantuan para petani sawah seperti pupuk, racun, dan dompeng. sesuai tanggungjawab pemerintah daerah dalam hal ini dinas peternakan dan perkebunan Kab. Pinrang.

Berikut yang dipaparkan oleh salah satu pemerintah daerah dari Dinas Peternakan dan Perkebunan di Kec. Batulappa oleh Bapak. Sunardi :

Saya sebagai pemerintah dinas peternakan dan perkebunan disini kerjasama dengan kelompok tani. Pelatihan ini antusias dalam semua kegiatan yang kami berikan kepada dia. Selain itu kami juga memberikan pemberdayaan manusia berupa bibit, pupuk, dan memberikan pembinaan dengan cara pemupukan, sanitasi, pengendalian hama, dan panen sering atau PSPSP. Berdasarkan secara strukur yang kami ajarkan sesuai anjuran pemerintah. Jadi peran kami dalam meningkatkan pemberdayaan petani kakao kami lakukan sekolah lapang atau SLPHT, memberikan bimbingan, dan pemahaman supaya kami sebagai pemerintah bisa meningkatkan kualitas biji kakao para petani.⁴¹

Diperkuat lagi oleh penuturan informan lainnya Sunardi sebagai pemerintah daerah dari dinas peternakan dan perkebunan bahwa pemerintah daerah kabupaten pinrang khususnya dari Dinas Peternakan dan Perkebunan bekerjasama dengan kelompok tani atau petani kakao yang selama ini para petani antusias dalam mengikuti semua kegiatan pemerintah daerah seperti pemerintah daerah menyekolahkan petani kakao dimana peran yang dilakukan pemerintah

⁴¹Sunardi, Dinas Peternakan Dan Perkebunan Pinrang Wawancara, 01 Agustus 2017

daerah dalam meningkatkan pengetahuan petani kakao adalah melakukan SLPHT (Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu). Dengan adanya SLPHT petani bisa meningkatkan kualitas kakaonya dan mampu mengatasi hama dan penyakit perkebunan petani kakao yang ada di Kec. Batulappa Kab. Pinrang.

Adapun mengenai PsPSP (Panen Sering, Pemupukan, Sanitasi, Dan Pemangkasan), pelatihan dibidang praktik perkebunan untuk petani kakao yang mampu meningkatkan pengetahuannya ketika terjun kelapangan. Pelatihan ini diberikan kepada petani kakao maupun kelompok tani untuk mampu mengendalikan hama dan penyakit yang selama ini petani alami sehingga apa yang diharapkan petani kepada pemerintah daerah dapat terpenuhi.

Menurut salah satu petani kakao ketika belum melakukan PsPSP dari Bapak Labonding :

Setelah adakan PsPSP ini hasilnya meningkat, dulu karna waktu itu banyak penyakit, setelah ada PsPSP itu sudah ada peningkatan.⁴²

Dapat diketahui bahwa yang dikatakan informan setelah dia mengadakan PsPSP penghasilan kakao petani meningkat dikarenakan adanya sekolah lapang. mereka dulu belum mengadakan PsPSP yang mengakibatkan tanaman kakao petani khususnya di kecamatan batulappa banyak hama dan penyakit yang susah di kendalikan. Maka dengan adanya PsPSP para petani kakao di Kec. Batulappa bisa mempraktikkan perkebunan kakao dalam meningkatkan pengetahuannya. Jadi disimpulkan bahwa pada prinsip PsPSP itu sangat tidak boleh dipisahkan oleh para petani kakao karena ini adalah teknik budidaya kakao di bidang tanaman

⁴² Labonding, Petani Kakao, Wawancara, 01 Agustus 2017 Di Desa Bamba Kel. Kassa

kakao sekaligus adalah dalam rangka mengendalikan hama dan penyakit di tanaman kakao, jadi petani wajib melakukan itu.

Dalam pengetahuan tentang Panen Sering kegiatan pemetikan buah yang telah masak secara fisiologis dalam waktu tertentu. Jadi buah kakao yang layak dipanen itu warna kuning dan yang mudah belum layak dipanen karena masih berwarna hijau. Pemerintah sekarang juga memberikan pengetahuan tentang kakao berwarna yang sudah masak dan warnanya masih belum masak. Bukan hanya mengenai warna kakao, tapi peralatan-peralatan atau alat panen yang digunakan untuk memetik kakao seperti ember, karung, gunting, dan gala. Namun selama ini petani hanya menggunakan alat tradisional seperti gala bambu kecil tapi berukuran panjang dengan menggunakan besi yang di bengkokkan seadanya dengan lilitan karet hitam. Selain adanya peralatan petani juga diberikan pelatihan tempelan samping untuk meningkatkan biji kakao sehingga hasil panen meningkat. Didalam Pemupukan sangat penting dalam budidaya tanaman kakao sejak awal penanaman sampai tanaman berproduksi. Pemupukan mempunyai tujuan untuk mengganti dan menyediakan unsur-unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Dosis pemupukan tergantung pada kondisi dan umur tanaman, kondisi tanah, dan kondisi lingkungan. Sedangkan cara pemupukan dapat dengan cara penaburan, larikan, piringan, dan cara tugal. Waktu pemupukan dilakukan pada awal dan akhir musim hujan atau tanaman kakao mulai berbunga setelah pemangkasan. Mengenai peran pemerintah daerah kepada petani, bahwa pemerintah itu memberikan pelatihan cara memupuk kakao dengan benar, seperti petani melakukan praktik perkebunan kakao khususnya di kec. Batulappa Kab. Pinrang

dengan cara membersihkan daun-daun kering yang berdekatan dengan tanaman kakao yang masih berbunga, menggunakan ember, dan piring untuk menaburkan pupuk di area tanaman kakao. Selain bibit kakao tanaman yang lainnya seperti lada, ramica, dan lansat juga di berikan.

Bukan hanya sekedar pemupukan yang di praktikkan tapi Sanitasi atau pembersihan di areal perkebunan kakao dari segala sampah seperti ranting, cabang, dan daun serta bahan lain yang tidak diinginkan. Seperti sisa kulit buah hasil panen termasuk buah kakao yang terserang hama penyakit, di samping itu juga dilakukan terhadap rumput. Hal tersebut dapat dilakukan oleh petani kakao di kec. Batulappa Kab. Pinrang dengan pembersihan kulit buah kakao yang telah dipanen kedalam tanah. Baik dari buah yang busuk maupun buah yang sudah hitam dan kering yang terkena hama. Dengan adanya pemerintah daerah petani bisa mengetahui cara merawat perkebunan kakao mana terkena hama dan mana yang tidak. Di situlah petani diberikan praktik yang diberikan oleh pemerintah daerah sesuai metode yang di pakai, yaitu PSPSP (Panen Sering Pemupukan Sanitasi Pemangkasan). Karena dengan melakukan perawatan secara rutin dapat menurunkan tingkat serangan organisme pengganggu tanaman dan meningkatkan produktivitas tanaman kakao yang diusahakan. Selain itu juga bermanfaat meningkatkan kualitas produksi kakao.

Dari penuturan pembicaraan Bapak. Ibrahim selaku Kepala Desa Tapporang:

saya sudah berkebun selama 20 tahun kita kerja di sini, waktu tidak dipergunakan dulu PsPSP hasilnya belum seberapa, buah juga banyak yang rusak, sejak diprogram kan ini PsPSP hasil sudah meningkat.⁴³

Jadi dapat diketahui apa yang di katakan narasumber tersebut, bahwa petani puas dalam pelatihan maupun dari segi praktik yang di berikan pemerintah daerah, namun petani kakao merasa tidak nyaman kalau fasilitasnya masih kurang seperti yang dikatakan narasumber, seperti kondisi jalanan rusak dan saluran air ke kebun petani masih belum ada. Inilah yang di harapkan petani kakao kepada pemerintah daerah, Sehingga kalau jalanan itu sudah bagus, sanitasinya sudah lengkap, maka petani bisa cepat mengendalikan hama, dan penyakit serta produk hasil kakaonya memuaskan.

Pemangkasan juga sangat dibutuhkan oleh petani kakao sebelum panen dimulai. Di dalam pemangkasan kegiatan SLPHT mampu meningkatkan pengetahuan membuang cabang, ranting atau daun yang tidak produktif untuk mengatur distribusi cahaya matahari tanaman sehingga proses bisa berjalan secara efektif. Dalam tujuan pemangkasan tersebut mampu merangsang pertumbuhan tanaman, dan pembuahan serta mengendalikan hama dan penyakit yang menyerang tanaman kakao. Pemangkasan dengan memotong ranting-ranting daun yang terlindungi dan tunas air yang terdapat pada batang menyebabkan penyerapan zat-zat makanan oleh tanaman kurang efisien. Petani responden sebagian besar masih enggan melakukan pemangkasan karena faktor tenaga dan biaya. Kendati demikian, SLPHT dan PPSPP pemerintah juga memberikan sumber daya manusia berupa bibit, dan pupuk, serta memberikan pembinaan,

⁴³ Ibrahim, Selaku Kepala Desa Tapporang, Wawancara, 15 Agustus 2017 Jl. Poching Kampung Baru Desa Tapporang

pemahaman, motivasi supaya petani kakao mampu meningkatkan pengetahuan dibidang praktik perkebunan kakao di Kec. Batulappa Kab. Pinrang Secara efektif dan efisien. Selain itu, di Kab. Pinrang khususnya di Kec. Batulappa Kab. Pinrang terdapat nama-nama anggota kelompok tani yang ikut dalam kegiatan praktik perkebunan kakao di batulappa pinrang:

Tabel 4.2.1.1 Daftar nama-nama anggota kelompok tani kakao Kec. Batulappa Kab. Pinrang

NO	NAMA LENGKAP PETANI	JABATAN	ALAMAT	LUAS LAHAN (Ha)	
				KAKAO	LADA
1	LUKMAN. H	KETUA	BAMBA	0,8	0,3
2	MUHAMMAD YUSUF	SEKRETARIS	BAMBA	0,90	
3	SUDURI	BENDAHARA	BAMBA	1,25	
4	SYAHRIR	ANGGOTA	BAMBA	0,75	0,2
5	RUSDI BIN ABU	ANGGOTA	BAMBA	0,82	
6	MUH. SALEH	ANGGOTA	BAMBA	0,65	
7	BUHARI	ANGGOTA	BAMBA	1,15	
8	ASNAWI	ANGGOTA	BAMBA	0,40	
9	DARWIS	ANGGOTA	Jl. SEREI	0,55	
10	USMAN	ANGGOTA	BAMBA	0,75	
11	ABD. HAMID	ANGGOTA	LEMPA	1,27	
12	AGUSSALIM	ANGGOTA	BAMBA	0,35	
13	DARMAWAN	ANGGOTA	BAMBA	0,75	
14	KARMAN	ANGGOTA	BAMBA	1,35	0,3
15	MASE	ANGGOTA	BAMBA	1,27	
16	SUDIRMAN	ANGGOTA	BAMBA	0,35	
17	SARIBUNGA	ANGGOTA	BAMBA	0,40	
18	LABONDING	ANGGOTA	BAMBA	0,84	
19	DIRHAMSyah	ANGGOTA	BAMBA	1,35	0,25
20	SANARIA	ANGGOTA	BAMBA	0,45	
21	MUHAMMAD SARIF	ANGGOTA	BAMBA	1,40	
22	BORA	ANGGOTA	BAMBA	1,30	

23	MAISA	ANGGOTA	BAMBA	0,65	
24	MUKSIN ALI	ANGGOTA	BAMBA	0,70	
25	SAKKA	ANGGOTA	BAMBA	1,15	
26	MUSTAPA	ANGGOTA	BAMBA	0,60	
27	SUADI	ANGGOTA	BAMBA	0,80	
28	RAWIH	ANGGOTA	BAMBA	0,75	
29	JULLA	ANGGOTA	BAMBA	0,60	
30	ARIFUDDIN	ANGGOTA	BAMBA	0,70	
31	SUKRI,S.Pdi	ANGGOTA	BAMBA	0,50	
32	MH. NUR. S	ANGGOTA	JL. BENDUNG BENTENG	0,50	
33	SUKMAN	ANGGOTA	BAMBA	0,40	
34	HUDAWI	ANGGOTA	BAMBA	1,00	0,3
35	ABD. HAMID. L	ANGGOTA	BAMBA	1,25	
36	SUARDI DOLANG	ANGGOTA	BAMBA	0,80	
JUMLAH					

Sumber Data: Kelompok Tani kakao Kec. Batulappa Kab. Pinrang

Berdasarkan jumlah anggota kelompok tani kakao yang didapatkan oleh peneliti 36 orang yang ikut serta dalam kegiatan pelatihan dibidang praktik perkebunan kakao yang di perankan pemerintah daerah dinas peternakan dan perkebunan, yaitu 34 anggota kelompok petani kakao dari Kel. Kassa Kec. Batulappa, 2 orang anggota kelompok tani kakao dari Jl. Bendung Benteng, dan jl. Serei. Maka, kegiatan SLPHT yang dilakukan pemerintah daerah dari dinas peternakan dan perkebunan kepada petani kakao di kec. Batulappa kab. Pinrang antusias memberikan pelatihan kepada para petani sesuai tugas dan fungsinya sebagai pemerintah daerah. Selain tugas dan fungsinya yang dimiliki pemerintah daerah, pemerintah juga memberikan bentuk kewaspadaan dalam memnagani tanaman kakao para petani untuk mengendalikan hama dan sebagainya.

Dengan demikian, pemerintah daerah memberikan dukungan kepada

petani dan bekerjasama dari kelompok tani dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang berguna bagi masyarakat khususnya petani kakao untuk mempraktikkan perkebunan kakao dalam mengatasi hama, dan penyakit kakao di Batulappa Kab. Pinrang.

4.3 Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Pengetahuan Kepada Petani Kakao Tentang Cara Pengelolaan Biji Kakao Di Batulappa Pinrang

Salah satu bentuk peran pemerintah daerah dalam memberikan pengetahuan kepada petani kakao adalah sosialisasi. Sosialisasi sangat berguna bagi pemerintah untuk para petani untuk mengetahui informasi yang lebih aktual karena dengan adanya informasi, petani bisa tahu dan faham apa yang disosialisasikan pemerintah daerah atau dinas peternakan dan perkebunan kab. Pinrang. Mengenai sosialisasi pemerintah daerah mensosialisasikan tentang cara pengelolaan biji kakao mulai dari merawat tanaman kakao sampai dikesportir. Kemudian diperlukan untuk petani lebih mengetahui cara mengelolah dan merawat tanamannya karena tanpa ada sosialisasi petani akan tidak tahu sama sekali tentang mengelolah biji kakaonya.

Sesuai dari proses internalisasinya dalam mengelolah biji kakao dari pembicaraan Bapak Bahuni :

Cara pengelolaan coklat itu, pada saat panen kita pisahkan kita memangkas daun yang terkena hama dan penyakit. Kemudian lakukan pembersihan daun kering untuk pemupukan di area tanaman coklat. Setelah itu tunggu 6 bulan tanaman coklat itu berbuah, lakukan penyemprotan buah supaya itu coklat yang ditanam tambah banyak buahnya. Setelah itu 2 bulan kemudian baru dipanen, dipisahkan antara coklat yang busuk atau terkena hama dan penyakit dengan yang tidak terkena hama. kemudian dikeringkan itu coklat di seberang aspal, setelah

baru di timbang itu coklat di padangkang coklat dari palopo. Itu ji na kasikan ka pelatihan pemerintah daerah kalau praktik perkebunan.⁴⁴

Jadi penuturan yang dikatakan oleh narasumber bahwa Dalam proses pengelolalah kakao petani di daerah kec. Batulappa kab. Pinrang bahwa petani tersebut sudah mengetahui cara menanamnya mulai dari awal sampai akhir. Selain cara pengelolahannya dapat disimak bahwa petani mengeringkan kakaonya di aspal berarti cara mengeringkan kakao petani itu tidak konsisiten. Akibatnya pasti jumlah kakaonya akan menurun dan dipotong oleh pedagang yang membeli hasil kakao yang di panen oleh para petani. Kemudian pedagang coklat dari palopo yang akan dikirimkan ke perusahaanya sudah ada. Ini berati di kabupaten pinrang belum ada perusahaan pabrik kakao yang menangani proses produksi kakao tersebut. Dengan harapan petani bisa mendapatkan dana bantuan yang di berikan pemerintah, tetapi bukan hanya dari segi dana melainkan pengetahuan-pengetahuan yang berguna bagi petani kakao yang belum memahami pelatihan-pelatihan maupun secara praktik perkebunan kakao yang masih kurang mampu khususnya berbagai desa maupun Kelurahan yang ada di Kec. Batulappa Kab. Pinrang. Kemudian Titik berat dalam pengolahan biji kakao terletak pada proses fermentasi. Dimana proses ini terjadi pembentukan cita rasa coklat, pengurangan rasa pahit dan perbaikan penampakan fisik biji kakao. selama proses fermentasi biji kakao terjadi pembentukan senyawa cita rasa biji kakao. Hal inilah yang diungkapkan salah seorang petani Bapak Yato:

itu kalau kita fermentasi juga samaji tonji harganya, fermentasi atau tidak difermentasi tetap sama ji juga harganya, justru kalau kita to fermentasi itu yang untung sebenarnya itu padangkangnya.⁴⁵

⁴⁴ Bahuni, Petani Kakao, Wawancara, 15 Agustus 2017 Di Pociing Desa Tapporang

Mereka beranggapan jika kakao mereka difermentasi maka keuntungan hanya diperoleh para tengkulak ketika tengkulak menjualnya ke perusahaan yang mengolah kakao menjadi bahan makanan. Para petani juga belum memiliki mitra dengan perusahaan besar untuk menjual kakao mereka, sehingga lebih memilih untuk tidak memfermentasi kakao mereka. Hal inilah yang dikemukakan oleh salah seorang petani bernama Bapak Firman:

di sini kita juga belum punya mitra, jadi kita jual buah kakao di sini Cuma lewat pengepul, seandainya ada kita punya mitra mungkin mau jeki fermentasi karna pasti sesuai harganya.⁴⁵

Petani kakao dapat menjual hasil produksi kakao melalui para pembeli yang biasa disebut sebagai tengkulak. Para tengkulak ini datang ke Desa hanya 1 minggu sekali yaitu pada hari Kamis dan Minggu. Selain tengkulak mingguan, ada juga para pengumpul yang dapat membeli biji kakao setiap hari, hanya saja harga beli yang ditawarkan sedikit murah. Tidak ada tempat transaksi khusus, petani dapat menunggu para tengkulak atau pedagang kakao datang ke rumah mereka. Namun ada juga petani kakao yang membawanya ke tempat pedagang untuk dijual. Semakin baik kualitasnya semakin tinggi harga jualnya. Sebaliknya kakao dengan kualitas rendah biasanya dijual berkisar Rp.9.000-Rp.7000/Kg, semakin rendah kualitasnya maka semakin rendah harga jualnya.

Adapun jenis peran pemerintah daerah kab. Pinrang dinas peternakan dan perkebunan dapat dilihat dari bawah tabel tersebut.

⁴⁵ Yato, Petani Kakao, Wawancara, Tanggal 05 September 2017 jl. Poching kampung baru Desa Tapporang

⁴⁶ Firman, Petani Kakao, Wawancara, Tanggal 05 September 2017 Di Bila 1 Desa Tapporang

Tabel 4.3.1 Jenis Peran Kelembagaan Pemerintah Kab. Pinrang Dinas Peternakan dan Perkebunan Bagian Kabid Agribisnis dan Penyuluhan Perkebunan

No	Kabid Agribisnis dan Penyuluhan Perkebunan	Peran Kelembagaan Fungsional
1	Kasi Kelembagaan Ketenagaan, dan Penyuluhan Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan - Pelaksanaan (Monitoring) - Memberikan bimbingan teknis - Memantau - Mengevaluasi dibidang kelembagaan - Ketenagaan, dan - Penyuluhan perkebunan
2	Kasi Pengelolaan, Pemasaran, dan Promosi Hasil Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan - Pelaksanaan - Pemberian bimbingan teknis - Evaluasi dibidang pengolahan, pemasaran, dan - Promosi hasil pemasaran
3	Kasi Bimbingan Usaha Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan - Pelaksanaan - Pemberian bimbingan teknis

		- Pemantauan, dan - Evaluasi pelaksanaan bimbingan usaha perkebunan
--	--	---

Sumber Data: Pemerintah Daerah Dinas Peternakan dan Perkebunan

Kab. Pinrang

Berdasarkan sesuai dengan jenis peran yang digunakan pemerintah daerah dari dinas peternakan dan perkebunan yang menangani pemberdayaan petani kakao, bahwa setiap seksi mempunyai peran tersendiri maupun tanggung jawabnya. Adapun tugas seksi kelembagaan, ketenagaan, dan penyuluhan perkebunan menyelenggarakan fungsi:

4.3.1.1 penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan program dan kegiatan seksi kelembagaan, ketenagaan dan penyuluhan dan perkebunan

4.3.1.2 pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan seksi kelembagaan, ketenagaan, dan penyuluhan perkebunan

4.3.1.3 pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan tugas seksi kelembagaan, ketenagaan dan penyuluhan perkebunan

4.3.1.4 menyelenggarakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas seksi pengolahan, pemasaran, dan promosi hasil perkebunan sesuai peran pemerintah daerah dinas peternakan dan perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- 4.3.1.4.1 penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kerja seksi pengelolaan, pemasaran, dan promosi hasil perkebunan
- 4.3.1.4.2 pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pengawasan dan promosi hasil perkebunan
- 4.3.1.4.3 pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan tugas dalam lingkup seksi pengelolaan, pemasaran, dan promosi hasil perkebunan
- 4.3.1.4.4 penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pelaksanaan bidang agribisnis dan penyuluhan perkebunan pemerintah daerah dinas peternakan dan perkebunan kab. Pinrang menyelenggarakan fungsi:

- 4.3.1.4.4.1 penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan program dan kegiatan bidang agribisnis dan penyuluhan perkebunan
- 4.3.1.4.4.2 pembinaan pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan bidang agribisnis dan penyuluhan dan perkebunan
- 4.3.1.4.4.3 pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan tugas bidang agribisnis dan penyuluhan perkebunan
- 4.3.1.4.4.4 penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel. 4.3.2 Jenis Peran Kelembagaan Pemerintah Kab. Pinrang Dinas Peternakan dan Perkebunan dari kapid pengembangan perkebunan

No	Kabid Pengembangan Perkebunan	Peran Kelembagaan Fungsional
1	Kasi Perbenihan dan Sarana Produksi	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan bahan penyusunan - Pelaksanaan kebijakan - Pemberian bimbingan teknis - Pemantauan - Evaluasi dibidang perbenihan, dan - Sarana produksi
2	Kasi Sarana dan Prasarana Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan bahan penyusunan - Pelaksanaan kebijakan - Pemberian bimbingan teknis - Pemantauan - Evaluasi dibidang sarana, dan - Prasarana perkebunan
3	Kasi Perlindungan Tanaman Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan bahan penyusunan - Pelaksanaan kebijakan - Pemberian bimbingan teknis - Pemantauan - Evaluasi dibidang perlindungan perkebunan

Sumber Data: Pemerintah Daerah Kab. Pinrang Dinas Peternakan Dan Perkebunan Bagian Kabid Pengembangan Perkebunan

Berdasarkan sesuai dengan jenis peran yang digunakan pemerintah daerah dari dinas peternakan dan perkebunan yang menangani pemberdayaan petani kakao, bahwa setiap seksi mempunyai peran tersendiri maupun tanggung jawabnya.

4.3.2 Tugas dan fungsi seksi perbenihan dan produksi perkebunan sebagai berikut:

4.3.2.1 penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan program dan kegiatan seksi perbenihan dan produksi perkebunan

4.3.2.2 pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan seksi perbenihan dan produksi perkebunan

4.3.2.3 pelaksanaan, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan tugas seksi perbenihan dan produksi perkebunan

4.3.2.4 penyelenggara fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.3.3 rincian tugas kepala seksi perbenihan dan produksi perkebunan

Adapun rincian tugas kepala seksi perbenihan dan produksi perkebunan, yaitu sebagai berikut:

4.3.3.1 mengatur, mendistribusikan, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas bawahannya

4.3.3.2 melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan produksi perkebunan

4.3.3.3 melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman perkebunan

4.3.3.4 melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya perkebunan.

4.3.4 tugas dan fungsi seksi prasarana dan sarana perkebunan

adapun tugas dan fungsi seksi prasarana perkebunan, yaitu sebagai berikut:

4.3.4.1 menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan program dan kegiatan seksi prasarana dan sarana perkebunan

4.3.4.2 pembinaan pengoordinasian, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan seksi prasarana dan sarana perkebunan

4.3.4.3 pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan tugas seksi prasarana dan sarana perkebunan

4.3.4.4 menyelenggarakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.3.5 rincian tugas kepala seksi prasarana dan sarana perkebunan

Adapun rincian tugas kepala seksi prasarana dan sarana perkebunan adalah sebagai berikut:

4.3.5.1 mengatur, mendistribusikan, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas bawahannya

4.3.5.2 melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan kebutuhan prasarana dan sarana produksi

4.3.5.3 melakukan pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk, peptisida, serta alat mesin perkebunan

4.3.5.4 melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan, ketenagaan dan penyuluhan perkebunan.

4.3.6 tugas dan fungsi seksi perlindungan tanaman perkebunan

Adapun tugas dan fungsi seksi perlindungan tanaman perkebunan kakao, yaitu sebagai berikut:

4.3.6.1 penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan program dan kegiatan seksi perlindungan tanaman perkebunan

4.3.6.2 pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan seksi perlindungan tanaman perkebunan

4.3.6.3 pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan tugas seksi perlindungan tanaman perkebunan

4.3.6.4 penyelenggaran fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.3.7 rincian tugas kepala seksi perlindungan tanaman perkebunan

adapun rincian tugas pelaksanaan seksi perlindungan tanaman perkebunan sebagai berikut:

4.3.7.1 mengatur, mendistribusikan, mengoordinasian dan mengendalikan tugas bawahannya

4.3.7.2 melakukan penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tanaman (OPT) dibidang perkebunan

4.3.7.3 melakukan penyiapan melakukan pengolahan data organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan

4.3.7.4 melakukan penyiapan bahan sekolah lapang atau SLPHT (sekolah lapang pengendalian hama terpadu) dibidang perkebunan.

Dari pembicaraan Bapak Muing selaku petani kakao di Poching Kampung Baru Desa Tapporang :

Hasil panennya jauh lebih banyak kalau tempelan samping, untuk 1 hektar dulu kita 5 karung hasil panen kakao sekarang 10 karung. Kalau sarana perlengkapan petani kakao di sini terbatas karena kami menggunakan gala atau bambu saja dan harga kakao di sini murah dan maunya kami harga kakao yang kita jual mustinya mahal. kalau bantuan tahun pemerintah daerah ini ada, tapi belum ada respon dari pemerintah.⁴⁷

Jadi dapat diketahui bahwa Meningkatkan mutu kakao berarti meningkatkan mutu kesejahteraan petani kakao. Hasil panen yang dikatakan Bapak Muing jauh lebih banyak ketika dia menggunakan metode tempelen samping tanaman kakao. Dengan adanya tempelan samping peningkatan biji kakao akan meningkat dari dulu yang hanya 5 karung menjadi 10 karung. Kemudian dilihat dari segi sarana yang di bicarakan oleh narasumber ketika dia memetik kakao, para petani kakao hanya menggunakan gala tradisional yang berbentuk bambu. jadi dengan menggunakan peralatan itu petani merasa tidak nyaman, dan banyak membuang tenaga, serta yang dari pemerintah mengenai peralatan perkebunan yang masih terbatas, dan harga yang murah. Mengenai harga kakao yang murah petani kakao merasa terkendala sehingga kurangnya ekonomi petani untuk membeli produk-produk misalnya racun, pupuk, kompa (Pompa Air) atau pengendalian air kalau musim panas. Sehingga harapan yang ingin dicapai petani kakao adalah pemerintah harus fokus ke pasca panen. Jadi yang menjadi masalah petani terbentur kepasar, karena yang membeli petani itu tengkulak atau pedagang

⁴⁷ Muing, Petani Kakao, Wawancara, 15 Agustus 2017 Di Poching Desa Tapporang

yang ingin membeli hasil panen petani kakao. Jadi kemauan petani supaya pemerintah harus memfasilitasi sarana sehingga para menikmati pengetahuannya, dan juga menikmati coklat yang dihasilkan. Karena masalah utama yang dirasakan petani kakao dalam mengerjakan kebunnya sampai ke pemasaran adalah harga, hama, dan penyakit kakao.

Sesuai yang dikatakan Bapak. Muammar Hudawy Sebagai kelompok tani di batulappa mengatakan:

Yang na kasi ajarkan ka pemerintah itu, di potong itu ranting-ranting daun yang terlindung, baru di potong cabang ranting yang mati, rusak atau terkena penyakit, Memotong tunas-tunas air yang terdapat pada batang, dan Memotong cabang-cabang yang terlalu tinggi. Itu yang na ajarkan ka memangkas tanaman coklat. Tapi merasa tidak senang ka' karna harga kakaonya menurun, bagusnya pemerintah bisa bekerjasama dengan pihak perusahaan yang menangani biji kakao di daerah kami sehingga biji kakao bisa meningkat.⁴⁸

Jadi dapat disimak diatas bahwa petani ingin pemerintah dan pihak perusahaan bekerjasama dalam menangani masalah harga, bukan juga masalah harga tetapi masalah dana bantuan berupa pupuk maupun peralatan pemangkasan sehingga perkebunan petani kakao bisa meningkat dan bisa mengelolah biji kakaonya yang berbasis fermentasi. Solusi untuk menekan tenaga dan biaya pemangkasan adalah dengan menggunakan jadwal pemangkasan berkala bersamaan dengan proses pemanenan. Sehingga setiap melakukan pemanenan petani bisa sekalian melakukan pemangkasan terhadap ranting-ranting yang terlindungi dan tunas air yang terdapat pada tanaman.

Kemudian disimpulkan bahwa pemerintah daerah kabupaten pinrang dari dinas peternakan dan perkebunan yang memiliki peran yang lebih efektif untuk

⁴⁸ Muammar Hudawy, Petani Kakao, Wawancara, 01 Agustus 2017 Di Bamba Kel. Kassa

meningkatkan pengetahuan petani terutama petani kakao yang lebih ingin mengetahui tentang cara mengelolah biji kakao. Hal lain yang juga berperan ikut menentukan tingkat pendapatan petani adalah rantai pemasaran kakao, sebab kenyataan menunjukkan bahwa banyaknya lapisan pedagang yang terlibat, sehingga menjadikan rantai tataniaga kakao di sini cukup panjang di kec. Batulappa Kab. Pinrang, dan kondisi demikian sudah merupakan suatu fenomena lama. Petani kakao tidak pernah bisa langsung dalam memasarkan produksi kakaonya kepada pabrik atau pedagang eksportir karena tidak adanya mitra atau perusahaan khususnya di Kab. Pinrang. Panjangnya rantai tataniaga itu berakibat kepada rendahnya harga jual di tingkat petani, karenanya petani hanya bisa menerima harga kakao apa adanya. Hal inilah kendala petani dalam mengelolah biji kakaonya karena kurangnya mitra atau belum ada perusahaan di Kabupaten Pinrang yang menangani pengelolahan biji kakao dan mengenai sosialisasi sangat mendukung para petani kakao terhadap pemerintah daerah dalam memberikan pengetahuan tentang pengelolahan biji kakao walaupun hanya sekedar pelatihan dalam mengelolah biji kakao, tapi bisa memberikan harapan besar bagi petani kakao yang menangani kakaonya, maka sosialisasi sangat diperlukan.

4.4 Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Petani Kakao Di Batulappa Pinrang Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam

Kakao sangat berguna bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas sehingga para petani kakao yang melakukan itu bisa mendapatkan penghasilan yang diinginkan. Sesuai dengan peran pemerintah daerah yaitu, meningkatkan taraf hidup petani bernuansa penghasilan seperti Pengadaan sarana produksi, dan

pengadaan sarana transportasi. Dimana semua pemerintah daerah atau maupun pada kelompok tani ikut berpartisipasi dalam kegiatan itu. Dengan demikian kegiatan itu bisa meningkatkan taraf hidup petani kakao yang ada di Kec. Batulappa Kabupaten Pinrang. Dengan meningkatnya penghasilan petani kakao, maka berdampak kepada taraf hidupnya. Pola hidup sudah berubah, baik cara makan, cara berpakaian, pola interaksi, dan mobilitas sosial. Hal ini mengindikasikan bahwa tanaman kakao lebih baik dibandingkan dari pada tanaman lainnya. Alat teknologi yang digunakan dalam pertanian kakao adalah pisau sayat yang tajam, cangkul, parang, karung, keranjang. Adapun fungsi dari alat-alat fermentasi tersebut adalah:

- 4.4.3 Pisau sayatang tajam digunakan untuk melakukan teknologi samping. Pisau sayat harus tajam dan bersih agar entris bisa disambung dengan baik dan terbebas dari kuman yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman kakao. selain itu pisau juga dapat digunaka untuk membelah buah kakao yang telah dipanen untuk dipisahkan daging dan kulitnya.
- 4.4.4 Cangkul digunakan untuk membersihkan tanaman yang mengganggu disekitar pohon kakao.
- 4.4.5 Parang digunakan untuk memangkas ranting pohon kakao yang lebat. Pemangkasan dimaksudkan agar tanaman kakao tersebut mendapatkan sinar matahari secara merata.
- 4.4.6 Keranjang ini berfungsi untuk menampung semua tanaman kakao yang telah dipanen dan dilepas dari cangkangnya. Tanaman kakao yang telah

dimasukkan ke dalam karun siap untuk dibawa pulang untuk langsung dijemur atau terlebih dahulu difermentasi.

Sesuai dengan perkataan dari Bapak Nursan dari Pemda Dinas Peternakan

Dan Perkebunan:

Kami berikan Bantuan penggalahan, alat penjemuran, menilai untuk petani berperan untuk berkelanjutan, bantuan hibah, tergantung dari produksinya tambah mahal produksinya tambah mahal juga mahal harganya. Harapan petani pendapatannya petani meningkat. Dikasi pupuk, obat-obatan, gunting pangkas gunting gala, na manfaatkan ji, banyak yg tdk bantuan yang tidak di manfaatkan, terutama kalau alat-alat pengolahan seperti alat fermentasi tdk ada yg di manfaatkan di sana tinggalji, harapannya tetap memelihara kebun kakaonya.⁴⁹

Dari penuturan dari bapak nursan selaku pegawai dari dinas peternakan dan perkebunan, bahwa setiap peran pemerintah daerah dari dinas peternakan dan perkebunan memberikan bantuan. Adapun bantuannya seperti penggalahan alat penjemuran, obat-obatan, pupuk gunting gala, gunting pemangkasan serta memberikan bantuan hibah. Hibah maksudnya disini adalah membantu para petani kakao secara sukarela secara berkelanjutan sehingga petani kakao bisa meningkatkan perkebunan kakaonya lebih berkualitas. Terutama juga harga dollar, ketika dollar naik maka dollar pun naik, bukan juga sekedar dari mata uang dollar tergantung dari produksinya, mahal produksinya maka mahal juga harga kakao yang dijual. Begitupun juga alat-alat pengolahan seperti alat fermentasi. Namun para petani kakao di kec. Batulappa kab. Pinrang tidak ada yang memanfaatkan alat fermentasi. Sehingga harapan pemerintah disini untuk petani kakao untuk selalu menjaga perkebunannya sehingga tidak terkena hama dan penyakit, dan dapat meningkatkan kualitas kakaonya secara produktif.

⁴⁹ Nursan, Dinas Peternakan dan Perkebunan Pinrang, Wawancara, 04 September 2017

Petani di batulappa pinrang mulai intens mengembangbiakkan buah kakao ketika mereka mulai mengetahui cara penanaman dan pemeliharaan buah kakao melalui usaha salah seorang petani yang mencoba meningkatkan produktifitas tanaman kakao miliknya dengan cara tempelan. Ketika cara ini berhasil, petani lain juga mengikuti cara tempelan tersebut sehingga produktifitas tanaman kakao di batulappa pinrang semakin meningkat. Maka dari itu, peran pemerintah daerah sangat perlu dibutuhkan oleh petani kakao untuk meningkatkan kehidupan keluarganya terutama meningkatkan taraf hidup petani kakao di Kec. Batulappa Kab. Pinrang.

Dapat diketahui bahwa pemerintah daerah ini telah melaksanakan perannya sebagai pemerintah yang bertanggung jawab dalam melayani masyarakat khususnya petani kakao yang ada di Kec. Batulappa Kab. Pinrang. pemerintah daerah dari dinas peternakan dan perkebunan yang memegang perannya sebagai ujung tombak dalam meningkatkan taraf hidup para petani khusus petani kakao. Begitupun pada sistem operasional dalam menkoordinir setiap peran yang dimiliki pegawai untuk mengevaluasi kegiatan yang dilakukan. Namun mengenai peran pemerintah dinas peternakan dan perkebunan tersebut belum ada yang berperan untuk mengkoordinir kegiatan perbenihan dan sarana produksi karena sangat penting juga demi meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan petani.⁵⁰ semua peran yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang dikordinasikan oleh atasannya baik pada saat mulai kegiatan sampai evaluasi kinerja pemerintah daerah dari dinas peternakan dan

⁵⁰ Hartati Karim, Sekretaris Dinas Peternakan dan Perkebunan, Wawancara, Tanggal 15 September 2017

perkebunan dalam meningkatkan taraf hidup petani kakao khususnya di Kec. Batulappa kab. Pinrang.

Kebutuhan sumberdaya ekonomi manusia kepada petani kakao sangat diperlukan Tetapi selama ini yang dikatakan pemerintah daerah sudah memberikan bantuan kepada petani baik itu peralatan di butuhkan maupun produk-produk tanaman kakao. Begitupun salah satu kebanggaan petani kakao terhadap pemerintah daerah yang bukan hanya dilihat dari segi pengetahuan maupun teknik yang dimiliki pemerintah daerah kepada petani kakao. Namun perlu adanya bantuan-bantuan secara sukarela dari pemerintah daerah karena adanya bantuan tersebut para petani merasa puas, dan pahalanya juga diberikan kepada pemerintah daerah ketika memberikan bantuan secara sukarela dan ikhlas. Tetapi, kenyataan dalam kehidupan petani masih belum maksimal dan ada rasa ketidakpuasan petani kakao terhadap pemerintah daerah untuk meningkatkan taraf hidup petani seperti harga kakao yang masih murah dan nilai sangat tidak efektif.

Menurut penuturan Bapak Muh. Tahir selaku petani kakao.

Kalau saya, penilaian petani coklat kepada pemerintah sudah bagus, ji cara binaki cuman masalah na te'e masempo si tu koko, mane de'eng to bantuan, pada tu petani padi de'eng dialangi dompeng, pupuk, na racung, dan ini bantuan pemda.⁵¹

Berdasarkan penuturan dari narasumber tersebut Dapat diketahui apa yang dinilai petani kepada pemerintah daerah dalam menghidupkan ekonomi petani bahwa pemerintah sudah bagus menjalankan tugasnya seperti membina para petani kakao. Dengan Membina sangat berguna Namun kendala terus ada

⁵¹ Muh. Tahir, Petani Kakao, Wawancara, 15 Agustus 2017 Jl. Poching Kampung Baru Desa Tapporang

dikarenakan yang dirasakan oleh petani kakao adalah murahnya penjualan kakao sehingga para petani kurang memperhatikan lahan perkebunannya. Akibat petani akan merasa bosan merawat kakaonya ketika pemerintah tidak menindaklanjuti mengenai masalah yang dihadapi oleh petani kakao di batulappa Pinrang.

Sejalan dengan aktivitas petani kakao, dibutuhkan saling ketergantungan antara individu-individu. Pada tingkat antarpribadi, hal ini terlihat bahwa peran-peran individu saling melengkapi satu sama lain, kurang lebih bersifat harmonis. Saling ketergantungan secara harmonis ini merupakan hasil dari orientasi nilai yang dianut bersama oleh pihak-pihak yang berinteraksi khususnya pemerintah daerah dan petani kakao di Kec. Batulappa Kab. Pinrang, dan dari kenyataan bahwa penyesuaian diri dengan harapan-harapan petani kakao dengan buruh tani kakao untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak. Dengan apa yang bisa dinilai petani kakao di batulappa terhadap pemerintah daerah untuk memberikan bantuan-bantuan kepada petani kakao dalam meningkatkan kehidupan keluarganya karena bantuan tersebut yang dilakukan pemerintah daerah adalah bantuan bersifat sukarela maupun kerjasama antara pihak yang satu dengan lainnya.

Sesuai yang dikatakan Bpk. Muh. Daud yang bekerja sebagai petani kakao :

Kalau saya pemerintah itu nataati ji tanggung jawabnya seperti na kasikan ki pupuk, bibit, tapi jarang ada sarana transportasi disini, na ia sekarang te'e pole padangkang koko palopo ra marepe de'eng, mane na eksportir lako kampung na. Tapi lako te kampong ku taeng pa.⁵²

⁵² Muh. Daud, Petani Kakao, Wawancara, 15 Agustus 2017 Jl. Poching Kampung Baru Di Desa Tapporang.

Berdasarkan perkataan narasumber diatas bahwa pemerintah juga mentaati rasa tanggungjawabnya kepada masyarakat. Terutama pengadaan dana, tetapi pemerintah disini belum ada sarana transportasi seperti tengkulak di daerah Kecamatan Batulappa karena yang ada cuman dari tengkulak dari Palopo yang bekerjasama dengan pemeritah desa, dan hanya sebagaian desa saja yang melakukan itu seperti di bila 1 dan 2, serta Poching atau Kampung Baru yang ada di Desa Tapporang Kec. Batulappa Kab. Pinrang. Dapat diketahui bahwa pusat penjualan kakao itu berada di Desa Tapporang. Jadi tengkulak dari Palopo itu membeli kakao disini kemudian di pasarkan di daerah Palopo Karena Palopo itu ada perusahaan kakao. Sedangkan di pinrang tidak ada. Inilah yang menghambat petani kakao dalam meningkatkan kualitas kehidupan para petani kakao sehingga kehidupan petani kakao di Kecamatan Batulappa menurun karena tidak ada perusahaan atau pabrik kakao di Kab. Pinrang Karena belum ada yang mengelolahnya, dan itu sangat penting meningkatkan taraf hidup petani maupun kualitas mutu biji kakao. Selain itu, Fenomena sosial ini sesuai dengan pandangan pemerintah daerah yang menyebutkan bahwa petani kakao di pedesaan tersebut memberikan jaminan sosial khususnya para petani kakao untuk meningkatkan kelangsungan hidup warganya, yang tampil sebagai ujung tombak yang melindungi warganya dari ancaman hidup di bawah garis subsistensi. Bahwa tata ekonomi pedesaan di kec. Batulappa kab. Pinrang diikat oleh sistem moral pedesaan salah satu bentuk perilaku pemerintah daerah, agar beban kerja dan rejeki terbagi secara merata sehingga tidak ada satu warga desa pun yang sampai mengalami kelaparan. juga percaya bahwa perilaku pemerintah daerah dalam

menangani perekonomian masyarakat pedesaan khususnya petani kakao dilaksanakan berdasar prinsip keadilan yang mendahulukan keselamatan. Di bawah tekanan kemiskinan dan ekosistem yang sering banyak ulah, pemerintah daerah terpaksa mengembangkan prinsip ekonomi mendahulukan keselamatan hidup dari pada mengeluarkan energi untuk melakukan perbaikan nasib dalam membimbing para petani khususnya petani kakao di kec. Batulappa kab. Pinrang.

Dengan aspek penting pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan taraf hidup petani kakao di batulappa selama pemerintah daerah terus memperhatikan rakyatnya khususnya petani kakao yang di batulappa pinrang. Maka, pemerintah berperilaku adil, dan mentaati apa yang memang dipertanggungjawabkan dalam melayani rakyatnya yakni, meningkatkan taraf hidup petani kakao di Kec. Batulappa Kab. Pinrang.

Diperkuat penuturan informan lainnya dikatakan Bapak Andi Ridwan :

ya te'e pemerintah de'eng mo na laksanakan pelatihan PSPSP, na dio te mati lapangan napoangki bokku'a te'e cara na kendalikangi te PBK (Pengerek Buah Kakao), tapi yake tuntutanna te petani koko pole pemerintah taeng bang kua de'eng masalah. Ia pi ke de'eng masalah, yake pemerintah taeng ratu binaki masalah sanga na tu.⁵³

Maksud dari perkataan Andi Ridwan, bahwa pemerintah sekarang ada yang melakukan PsPSP, (Panen Sering Pemupukan Sanitasi Pemangkasan). kemudian ketika kelompok tani sudah berada dilapangan mereka akan diberikan praktek perkebunan kakao dengan cara mengendalikan PBK (Pengerek Buah Kakao). Sesuai program kerja bersama yang dilakukan oleh pemerintah daerah

⁵³ Andi Ridwan, Petani Kakao, Wawancara, 15 Agustus 2017 Jl. Poching Kampung Baru Desa Tapporang

dengan petani kakao yang terlibat tersebut. Mengenai sanksinya pemerintah daerah bahwa selama ini petani kakao tidak pernah menuntut pemerintah daerah kalau ada kegiatan yang dilakukan menurut narasumber tersebut. Maka dari itu, SLPHT (Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu), dan metode PsPSP (Panen Sering Pemupukan Sanitasi Pemangkasan) diberlakukan kepada petani untuk memahami cara pemupukan, pemangkasan, sanitasi, dan panen sering. Itupun kalau ada masalah pasti ada sanksinya dari pemerintah ketika tidak menjalankan tugas dengan baik dan tanggung jawab yang diberikan oleh atasannya, maka ada sanksinya dan teguran baik secara lisan maupun secara tulisan sebagai pelaksana karena yang melaksanakannya adalah pemerintah daerah.

Sedangkan mengeksekusi adalah masyarakat atau petani kakao sebagaimana peran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan taraf hidup petani kakao khususnya di Batulappa Pinrang. Terutama memberikan bantuan berupa formil dan materil, serta melatih para petani kakao yang juga Berkaitan dengan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu kakao bertujuan untuk meningkatkan produksi kakao salah satunya mengadakan bantuan sarana produksi dan peralatan kepada petani kakao dalam meningkatkan kesejahteraannya seperti sekarang ini pemerintah kabupaten pinrang dari dinas peternakan dan perkebunan memberikan bantuan alat fermentasi berupa alat penjemuran, geragaji, gala, pupuk, bibit, dan sebagainya.

Dengan melihat lebih banyak Para petani kakao yang ingin ikut serta dalam pelatihan yang merasa puas dan tertolong dengan adanya program yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang diselenggarakan dinas peternakan dan

perkebunan khususnya di Kab. Pinrang, maka penulis dapat mengatakan bahwa program maupun pelatihan ini patut untuk dipertahankan dan ditingkatkan lagi, karena tujuannya bukan mengejar untuk menjadi orang yang luar biasa, akan tetapi memiliki prinsip gotong royong, saling tolong menolong, dan orang kaya menolong orang yang miskin. Prinsip ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah/5:2 sebagai berikut:

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Terjemahannya.

....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁵⁴

Dari apa yang sudah dibahas diatas ada beberapa hal yang dapat disimpulkan bahwa peran yang dilakukan pemerintah daerah sebagai aktor dari dinas peternakan dan perkebunan senantiasa melakukan penyiapan bahan, melaksanakan kebijakan, memantau, dan mengevaluasi setiap bidang yang telah dilaksanakan sesuai dengan tanggungjawabnya. sebagai fasilitator dalam melayani rakyatnya khususnya petani kakao sangat perlu diberikan bantuan yang bersifat produktif mulai sosialisasi, fermentasi maupun penyuluhan atau pelatihan yang berikan secara sukarela kepada petani kakao di Kec. Batulappa Kab. Pinrang. Dengan harapan, pemerintah daerah perlu memperhatikan perkebunan kakao para petani yang terkena hama dan penyakit dan masalah harga biji kakao yang murah

⁵⁴ A Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis, h. 147.

yang selalu dirasakan petani kakao. Kemudian perlu adanya sebuah perusahaan yang menangani pengolahan biji kakao sehingga para petani bisa mengetahui dan merasakan hasil panennya khususnya di Kec. Batulappa Kab. Pinrang sebagai pusat penghasil kakao terbanyak di daerah Sulawesi Selatan. Pemerintah Daerah adalah bagian dari melayani rakyat lebih banyak yang memiliki kemaslahatan dari pada mudharatnya, dan tujuan dari pemerintah daerah dalam pemberdayaan petani kakao adalah untuk kemaslahatan umat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Dalam bidang praktik perkebunan kakao di Batulappa Pinrang pemerintah Dinas Peternakan Dan Perkebunan kab. Pinrang telah berperan sebagai motivator maupun fasilitator dalam melakukan SLPHT (Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu). Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan petani kakao. Adapun bentuk praktik perkebunan kakao yang diperankan pemerintah daerah adalah menggunakan metode PsPSP (Panen Sering Pemupukan Sanitasi dan Pemangkasan).
- 5.1.2 Dalam pengetahuannya, petani di Batulappa Kab. Pinrang telah menjadi lebih maju dengan teknologi baru yang dipakai oleh para petani yang didapatkan melalui pembelajaran dari luar maupun teknologi sederhana yang ditemukan sendiri oleh petani Batulappa Kab. Pinrang. Teknologi tersebut adalah teknologi dalam meningkatkan produktifitas tanaman kakao yang telah berumur tua dengan melakukan sosialisasi maupun penyuluhan. Tujuan tersebut untuk meningkatkan produksi biji kakao para petani lebih lebih eketif dan efisien dalam mengelolah biji kakao. Namun kendala petani disini dalam mengeringkan biji kakao tidak efisien.
- 5.1.3 Dalam peningkatan kehidupan petani kakao di Batulappa Kab. Pinrang Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam dari Pemerintah Dinas Peternakan

dan Perkebunan Kab. Pinrang sangat berperan dalam memberikan bantuan kepada petani kakao. Tujuannya untuk meningkatkan produksi kakao salah satunya mengadakan bantuan kepada petani kakao dalam meningkatkan kesejahteraanya seperti alat-alat fermentasi berupa alat penjemuran, geragaji, gala, pupuk, bibit, dan sebagainya. Namun kendala juga yang dirasakan petani kakao harga biji kakao sangat rendah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Petani Kakao Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Batulappa Pinrang) peneliti mengemukakan saran, saran ini dapat diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak yang terkait atau petani yang ingin meningkatkan mutu perkebunan kakaonya dengan adanya pelatihan yang diberikan pemerintah daerah dari dinas peternakan dan perkebunan yang akan diambil masa yang akan datang.

5.2.1 Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, bagusya pemerintah bisa bekerjasama dengan pihak perusahaan yang menangani biji kakao sehingga petani kakao bisa meningkatkan produksi kakao dan mengendalikan dari harga biji kakao murah menjadi harga biji kakao yang mahal, serta berkualitas yang lebih tinggi.

5.2.2 Bagi Petani Kakao di Kec. Batulappa, sebaiknya lebih memperhatikan tanaman kakaonya supaya terhindar dari hama dan penyakit guna memanfaatkan kelestarian alam, lingkungan, dan meningkatkan mutu kakaonya.

5.2.3 Bagi Kelompok Tani di Kec. Batulappa, sebaiknya melakukan pemantauan langsung pada lokasi perkebunan para petani kakao untuk mengetahui tanaman kakao yang terkena hama dan penyakit juga memudahkan evaluasi sebagai bahan penilaian pemerintah daerah secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Anwari, Djazuli H. A. 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Ummat: Sebuah Gagasan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Aji, F.B., Sirait Martin, S. 1990. *Perencanaan dan Evaluasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Aziz, Abdul. 2008. *Ekonomi Islam; Analisi Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdullah, H. Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Al Arif, M. Nur Rianto, Euis Amalia. 2014. *Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Cet. II; Jakarta: PT. Interpretama Fajar Mandiri.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Cet. XVIII; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Departemen Agama RI, Mardani. 2011. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fachruddin, Fuad M. 1982. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Salembah Tengah.
- Hafidhuddin, Didin, Hendri Tanjung. 2003. *Manajemen Syariah Dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pers.

- Heddy, Suwarsono. 2010. *Agroekosistem, Masalah dan Solusinya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Heni Isnawati Dengan Judul “Peran Kelembagaan Dalam Pemasaran Hasil Pertanian Kakao Di Desa Labokolo Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat”. Muna Barat, 2016.
- Indriyani, Damsar. 2009. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Cet. 3; Jakarta: Kencana.
- Martono, Nanang. 2011. *Sosiologi Perubahan Sosial; Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*. Jakarta: Rajawali Persada.
- Marni Dengan Judul “Pembayaran Upah Terhadap Pekerja Kebun Kakao Di Desa Watu Motaha Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka”. (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam: Parepare, 2013.
- Narbuko, Cholid, H. Abu Achmadi. 2010. *Metodelogi Penelitian*. Cet. XI; Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Narwoko Dwi J, Suyanto Bagon. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Cet. I; Jakarta: Kencana.
- Suyanto, Bagong, Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial*, Cet. III; Jakarta Kencana Prenada Media Group.
- Suwardi, Basroni. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Syafi'ie, H. Inu Kencana. 2004. *Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur'an*. Cet. I; Jakarta Bumi Aksara.
- Sagir, Soeharsono H. 2009. *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*.

Samuelson P.A, Nurdhaus, W.D. 1985. *Ekonomi I*. Cet. II; Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.

Sarwono, Sarlito, Wirawan. 2001. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Cet. VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 1993. *Sosiologi: Suatu Pengantar*.Cet. XVII; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sony Abner Damamain Dengan Judul “Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Melalui Program Pemberdayaan Rumput Laut (Studi Kasus Budidaya Rumput Laut Di Desa Sathean)”. Maluku, 2012.

Tim Penyusun. 2013. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi), Edisi Revisi Parepare: STAIN Parepare.

Viethzal, H. Rivai, H. Adi Buchari. 2013. *Islamic Economic: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*, Cet. II; Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Zubaedi. 2014. *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*.Cet. II; Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri.

Internet

Dianchocho.Blogspot.Com/2013/04/Pengertian-Fungsi-Dan-Asas-Pemerintah.(Diakses Pada Tanggal 17 Maret 2017).

e-journal.uajy.ac.id/386/3/2EA16576.pdf. (Diakses Pada Tanggal 17 Maret 2017).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Petani>. (Diakses Pada Tanggal 10 April 2017).

<https://budidayatanaman-perkebunan.blogspot.co.id/2014/09/budidaya-tanaman-kakao-1.html>. (Diakses Pada Tanggal 10 April 2017).

infodanpengertian.blogspot.co.id › Pertanian (Diakses Pada Tanggal 07 April 2017).

LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE

Alamat : Jl. Amal Bhakti No. 08 Surweng Kota Pinrang ☎ (0421) 21.307 📠 (0421) 24404
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

: B/1794 /Stl.06/PP.00.9/07/2017

: Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. PINRANG
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : ADRIANTO KASIM
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 17 Maret 1994
NIM : 13.2200.122
Jurusan / Program Studi : Syariat'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : BENTENG GALUNG, KEL. BENTENG, KEC. PATAMPANUA,
KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

" PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PETANI KAKAO PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI DI BATULAPPA PINRANG) "

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

17 Juli 2017

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga (APL)





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Bintang No. 01 Talp (0421) 925 030 - 925 914 - 925 915
PINRANG

Pinrang, 26 Juli 2017

Kepada

Nomor : 070 / 304 / Kemasy.

Yth. Camat Batulappa

Tempat :

di-

Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

Tempat.

Berdasarkan Surat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare Nomor :B-1794/St.08/PP.00.9/07/2017 tanggal 17 Juli 2017 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama	: ADRIANTO KASIM
Nim	: 13.2200.122
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan/Prog Study	: Mahasiswa/Muamalah
Alamat	: Benteng Galung, Kel. Benteng, Kec. Patampanna
Telephone	: 081245417240.

Bermaksud mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul " **PERAN PEMERINTAH DAERAH PEMBERDAYAAN PETANI KAKAO PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI DI BATULAPPA PINRANG)** " yang pelaksanaannya pada tanggal 01 Agustus s/d 30 September 2017.

Selubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui untuk memberikan rekomendasi penelitian dengan ketentuan bahwa :

1. Sebelum dan sesudah melakukan Penelitian kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati Pinrang melalui Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan SETDA Kabupaten Pinrang
2. Penelitian tidak menyimpang dari Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Mentaati semua Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat Istiadat Daerah setempat.
4. Menyerahkan 2 (Dua) rangkap Laporan Hasil Penelitian Kepada Bupati Pinrang melalui Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan SETDA Kabupaten Pinrang.
5. Surat rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak mentaati Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada Saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra
SETDA



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN BATULAPPA**

Jl. Poros Bilajeng - Batulappa Kode Pos 91253 Bilajeng

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 070/94 / 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Pemerintah Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang
mengatakan bahwa :

Nama : ADRIANTO KASIM
Nomor Induk Mahasiswa : 13.2200.122
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan / Prog. Study : Mahasiswa / Muamalah
Judul penelitian : Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan
Petani Kakao Perspektif Ekonomi Islam (Studi di
Batulappa Pinrang)
Alamat : Benteng Galung Kel Benteng Kecamatan
Patampuan.

Telah selesai melaksanakan penelitian terhitung mulai Tanggal 01 Agustus s/d 30
Agustus 2017. Berlokasi di Desa Tapporang dan Kelurahan Kassa Kec. Batulappa Kab.
Pinrang.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bilajeng, 30 September 2017



Wakil Bupati Pinrang sebagai laporan di Pinrang
tertinggal

**WAWANCARA UNTUK PEMERINTAH DAERAH, PETANI KAKAO,
DAN KELOMPOK TANI KAKAO DI KEC. BATULAPPA KAB.
PINRANG**

1. Peran Pemerintah Daerah Memberikan Pelatihan Dibidang Praktik Perkebunan Kakao Dalam Meningkatkan Pengetahuan Petani Di Batulappa Pinrang

1. Bagaimana bentuk peran pemerintah daerah memberikan pelatihan dibidang praktik perkebunan dalam meningkatkan pengetahuan petani di batulappa pinrang?
2. Bagaimana wujud perilaku peran pemerintah daerah memberikan pelatihan praktik perkebunan kakao dalam meningkatkan pengetahuan petani di batulappa pinrang?
3. Sejauhmana penilai petani kakao terhadap peran pemerintah daerah memberikan pelatihan dibidang praktik perkebunan kakao dalam meningkatkan pengetahuan petani di batulappa pinrang?
4. Apakah ada sanksi atau teguran ketika peran pemerintah daerah tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab memberikan pelatihan dibidang praktik perkebunan kakao dalam meningkatkan pengetahuan petani di batulappa pinrang! Kalau ada bagaimana bentuk sanksinya?
5. Adakah kendala yang dirasakan petani kakao terhadap peran pemerintah daerah memberikan pelatihan dibidang praktik perkebunan kakao dalam meningkatkan pengetahuan petani di batulappa pinrang! Kalau ada bagaimana bentuk kendalanya?
6. Apa harapan petani kakao terhadap peran pemerintah daerah memberikan pelatihan dibidang praktik perkebunan kakao dalam meningkatkan pengetahuan petani di batulappa pinrang?

2. Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Pengetahuan Kepada Petani Kakao Tentang Cara Mengelolah Biji Kakao Di Batulappa Pinrang

1. Bagaimana bentuk peran pemerintah daerah dalam memberikan pengetahuan kepada petani kakao tentang cara mengelolah biji kakao di batulappa pinrang?
2. Bagaimana bentuk wujud perilaku peran pemerintah daerah dalam memberikan pengetahuan kepada petani kakao tentang cara mengelolah biji kakao di batulappa pinrang?
3. Bagaimana peran pemerintah hingga sekarang dalam menilai pengetahuan kepada petani kakao tentang cara mengelolah biji kakao di batulappa pinrang?
4. Apakah ada sanksi atau teguran pemerintah daerah ketika tidak menjalankan perannya dalam memberikan pengetahuan tentang cara pengelolahan biji kakao di batulappa pinrang! Kalau ada bagaimana bentuk sanksinya?
5. Apakah kendala yang dirasakan petani kakao dalam memberikan pengetahuan kepada petani kakao tentang cara mengelolah biji kakao di batulappa pinrang! Kalau ada bagaimana bentuk kendalanya?
6. Apa harapan pemerintah daerah dalam memberikan pengetahuan tentang cara mengelolah biji kakao di batulappa pinrang?

3. Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Petani Kakao Di Batulappa Pinrang Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam

1. Bagaimana Bentuk Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan taraf hidup petani kakao di batulappa pinrang?
2. Bagaimana bentuk wujud perilaku peran pemerintah daerah dalam meningkatkan taraf hidup petani kakao di batulappa pinrang?
3. Sejauh mana penilaian peran pemerintah daerah hingga sekarang dalam meningkatkan taraf hidup petani kakao di batulappa pinrang?
4. Apakah ada sanksi atau teguran pemerintah daerah dalam meningkatkan taraf hidup petani kakao di batulappa pinrang! Kalau ada bagaimana bentuk sanksinya?
5. Apakah kendala yang dirasakan petani kakao terhadap peran pemerintah daerah dalam meningkatkan taraf hidup petani kakao di batulappa pinrang! Kalau ada bagaimana kendalanya?
6. Apa harapan pemerintah daerah dalam meningkatkan taraf hidup petani kakao di batulappa pinrang?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Syamsul Alam
Alamat : Bamba
Pekerjaan : Petani Coklat

Bahwa benar telah diwawancarai oleh *Adrianto Kasim* untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PETANI KAKAO PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI DI BATULAPPA PINRANG)**".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Batulappa, 01 Agustus 2017


SYAMSUL ALAM

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

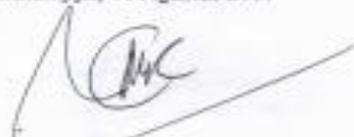
Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAR HUDAWY
Alamat : Bamba, kel. kassa
Pekerjaan : Petani kakao

Bahwa benar telah diwawancarai oleh *Adrianto Kasim* untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PETANI KAKAO PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI DI BATULAPPA PINRANG)**".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Batulappa, 01 Agustus 2017


MUHAMMAR HUDAWY

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sunardi

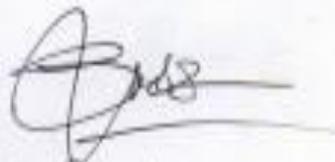
Alamat : Pinrang (Jl. Gunung Jati Mojong)

Pekerjaan : PNS / ASN (Aparatur Sipil Negara)
Bidang Perumahan dan Perkebunan

Bahwa benar telah diwawancarai oleh *Adrianto Kasim* untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PETANI KAKAO PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI DI BATULAPPA PINRANG)**".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Batulappa, 01 Agustus 2017


Sunardi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurman
Alamat : Bambaikel. kassa
Pekerjaan : Petani kakao / kelompok Tani Bunga raya

Bahwa benar telah diwawancarai oleh *Adrianto Kasim* untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PETANI KAKAO PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI DI BATULAPPA PINRANG)**".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Batulappa, 01 Agustus 2017



NURMAN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Labonding
Alamat : Bamba, Kel. Kassa
Pekerjaan : Petani Kakao

Bahwa benar telah diwawancarai oleh *Adrianto Kasim* untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian ***PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PETANI KAKAO PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI DI BATULAPPA PINRANG)***.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Batulappa, 01 Agustus 2017



LABONDING

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ibrahim
Alamat : Tapporang
Pekerjaan : Kepala Desa Tapporang

Bahwa benar telah diwawancarai oleh *Adrianto Kasim* untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PETANI KAKAO PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI DI BATULAPPA PINRANG)**".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Batulappa, 15 Agustus 2017



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : *Balhani*
Alamat : *Tapporang*
Pekerjaan : *Petani kakao*

Bahwa benar telah diwawancarai oleh *Adrianto Kasim* untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "***PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PETANI KAKAO PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI DI BATULAPPA PINRANG)***".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Batulappa, 15 Agustus 2017



BALHANI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ANDI RIDWAN

Alamat : TAPPORANG

Pekerjaan : PETANI KAKAO

Bahwa benar telah diwawancarai oleh *Adrianto Kasim* untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PETANI KAKAO PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI DI BATULAPPA PINRANG)**".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Batulappa, 15 Agustus 2017


ANDI RIDWAN
.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

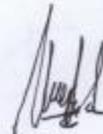
Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muing
Alamat : Kampung Baru, Desa Tapporang
Pekerjaan : Petani Kakao

Bahwa benar telah diwawancarai oleh *Adrianto Kasim* untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PETANI KAKAO PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI DI BATULAPPA PINRANG)**".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Batulappa, 15 Agustus 2017


.....
MUNG

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD DAUD
Alamat : TAPPORANG
Pekerjaan : PETANI KAKAO

Bahwa benar telah diwawancarai oleh *Adrianto Kasim* untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PETANI KAKAO PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI DI BATULAPPA PINRANG)**".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Batulappa, 15 Agustus 2017



MUHAMMAD DAUD

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

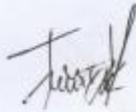
Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muli. Tahir
Alamat : Tapporang
Pekerjaan : Petani kakao

Bahwa benar telah diwawancarai oleh *Adrianto Kasim* untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PETANI KAKAO PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI DI BATULAPPA PINRANG)**".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Batulappa, 15 Agustus 2017


MULI. TAHIR

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

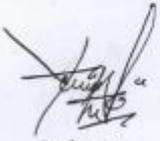
Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yato
Alamat : Jl. Poching kampung Baru, Desa Tapporang
Pekerjaan : Petani kakao

Bahwa benar telah diwawancarai oleh *Adrianto Kasim* untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PETANI KAKAO PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI DI BATULAPPA PINRANG)**".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Batulappa, 5 September 2017


YATO

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

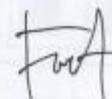
Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : *Firman*
Alamat : *Blok 1, Desa Tapparang*
Pekerjaan : *Petani Kakao*

Bahwa benar telah diwawancarai oleh *Adrianto Kasim* untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PETANI KAKAO PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI DI BATULAPPA PINRANG)**".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Batulappa, 5 September 2017


Firman.....



DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PINRANG
 Jalan Pahlawan Pahlawan Pahlawan KM 1, Komplek
 PINRANG 2011

- V. NAMA, NANGKA NIMBA TELIPIN DAN FAKSILE DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PINRANG
- 1. NANGKA KANTOR : 0412 - 82367
 - 2. NANGKA TELIPIN : 0412 - 82367
 - 3. NANGKA FAKSILE : 0412 - 82367
- VI. KEMBALI DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PINRANG



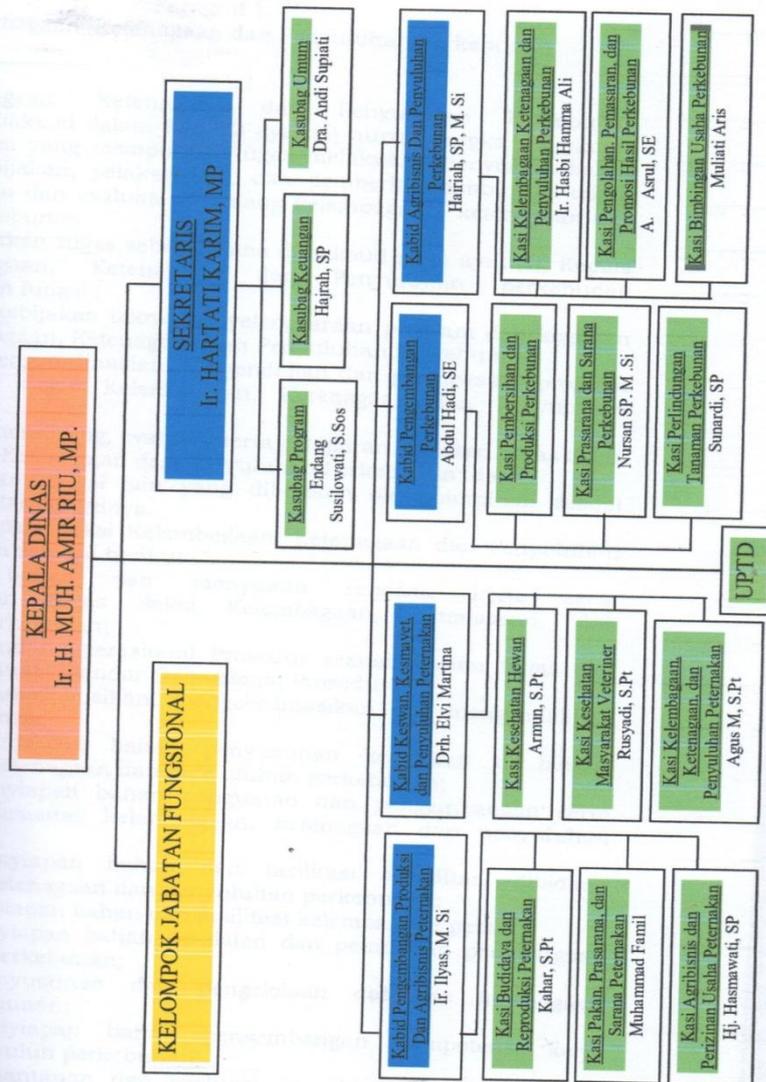
VII. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEMENTERIAN DAN PERIKANAN KAB. PINRANG



EPD

KABUPATEN PINRANG
 AA. BUPATI PINRANG
 Sekretaris Daerah
Rumoko
 DR. H. SYARIF HUSNAN SIDDI, MS, M.P.
 Pinrang / Pontiana Utama Media

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KAB. PINRANG



LOKASI KANTOR PEMERINTAH DAERAH DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KAB.
PINRANG



LOKASI KEGIATAN PELATIHAN PETANI KAKAO DI KEC. BATULAPPA KAB. PINRANG





WAWANCARA PEMERINTAH DAERAH DARI DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN,
KELOMPOK TANI, DAN PETANI KAKAO





RIWAYAT HIDUP PENULIS



Adrianto Kasim, lahir di Pinrang, Sulawesi Selatan. Pada Tanggal 17 Maret 1994, merupakan anak pertama (1) dari 3 bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Muh. Kasim dan Ibu Sitti Hasna. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis beralamat di Benteng Galung, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2007 lulus Dari SD Negeri 132 Patamapanua, Kabupaten Pinrang dan Pada Tahun 2010 lulus dari SMP Negeri 2 Patampanua, dan melanjutkan di SMA Negeri 1 Patampanua Kab. Pinrang, dan lulus pada tahun 2013. Saat SMA penulis pernah menjadi anggota PMR WIRA. Setelah itu kuliah di STAIN Parepare mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*). Setelah itu penulis pernah menjabat sebagai Wakil Komandan KSR-PMI Unit 01 Stain Parepare Tahun 2016, dan pernah menjadi Pengurus Harian Hima Prodi *Muamalah* HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Syariah dan Ekonomi Islam. Pada awal semester VIII tahun 2017 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul “*Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Petani Kakao Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Di Batulappa Pinrang)*”.